

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2020**



**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

Nama : Shinta Puspita Sari

Nomor Mahasiswa : 18313155

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2022

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2020**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1 Progra Studi Ekonomi Pembangunan, pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Shinta Puspita Sari  
Nomor Mahasiswa : 18313155  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2022

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shinta Puspita Sari  
NIM : 18313155  
Fakultas : Bisnis dan Ekonomika  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Islam Indonesia kepada saya.

Yogyakarta, 16 November 2022

Penulis,



Shinta Puspita Sari

## PENGESAHAN

### PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2020

Nama : Shinta Puspita Sari  
NIM : 18313155  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 15 November 2022

Telah disetujui dan disahkan oleh



Dosen Pembimbing,  
Unggul Priyadi, Dr.,M.Si.

## PENGESAHAN UJIAN

### BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KMEISKINAN DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2020**

Disusun Oleh : **SHINTA PUSPITA SARI**

Nomor Mahasiswa : **18313155**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Rabu, 14 Desember 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Unggul Priyadi,Dr.,M.Si.

Penguji : Suharto,,S.E., M.Si.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Johān Arrin, SE., M.Si.,Ph.D.,CFrA.

## MOTTO

“...Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah: 216)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

الجامعة الإسلامية  
الاستدلال بالانوار

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi 'alamiin atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT juga atas segala kemudahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala bentuk doa dan dukungannya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada adik dan sahabatku yang turut memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warabtuallah Wabarakatuh*

Puja dan puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu barokah seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai syarat kelulusan untuk gelar sarjana strata-1 pada jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020”**.

penulis menyadari bahwa terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan laporan penelitian ini, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya dan melimpahkan kesehatan, kekuatan serta kemudahan pada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan
2. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Unggul Priyadi, Dr., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi, yang selama masa bimbingan sudah meluangkan baik waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.



4. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D. selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Bapak Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, SE.M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi.
5. Ibu Dra. Ari Rudatin selaku dosen pembimbing akademik dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang dengan sabar telah memberikan pengajaran selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Teman-teman seperjuangan Fitri Awal Pasholihah, Diah Ayu Anzari, Eni Rakhmawati, Tiari Aristi Noviri, Widjiarti Nur Riswandi, Miftahul Hairatul Jannah dan Nisaul Khasanah, terimakasih sudah menemani dan memberikan bantuan selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat tercinta Frida Cahyaning Ramadhan, Anisa Rahma Dewi dan Rizqy Soraya Camila yang selalu memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis dalam hal ini berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat kepada semua pihak dan menyadari masih terdapat banyaknya kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatub.*

Yogyakarta, 14 November 2022

Penulis,

Shinta Puspita Sari

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PENGESAHAN UJIAN .....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematik Penulisan .....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Kajian Pustaka .....	8
2.2 Landasan Teori .....	14
2.2.1 Kemiskinan.....	14
2.2.2 Desentralisasi Fiskal .....	16
2.2.3 Sumber Penerimaan Daerah.....	17
2.2.3 IPM .....	22
2.2.4 PDRB per kapita .....	25
2.2.5 Hubungan Antar Variabel.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
2.4 Hipotesis.....	28

BAB III METODE PENELITIAN .....	30
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	30
3.3 Metode Analisis Data .....	33
3.4 Estimasi Model Regresi Data Panel .....	34
3.4.1 <i>Common Effect Model</i> (CEM) .....	34
3.4.2 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) .....	34
3.4.3 <i>Random Effect Model</i> (REM) .....	34
3.5 Pemilihan Model Terbaik .....	35
3.5.1 <i>Chow Test</i> ( Uji Chow) .....	35
3.5.2 <i>Hausman Test</i> .....	36
3.6 Uji Statistik .....	36
3.6.1 Uji T-Statistik .....	36
3.6.2 Uji F .....	37
3.6.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) / R-Squared .....	37
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	38
4.1 Deskripsi Data .....	38
4.2 Pemilihan Model Regresi .....	39
4.2.1 Uji Chow .....	40
4.2.2 Uji Hausman .....	40
4.3 Hasil Regresi Terbaik .....	41
4.4 Uji Hipotesis .....	42
4.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	42
4.4.2 Uji F .....	42
4.4.3 Uji T .....	43
4.5 Analisis Ekonomi .....	44
4.5.1 Pengaruh PAD Terhadap Kemiskinan .....	44
4.5.2 Pengaruh DAU Terhadap Kemiskinan, .....	45
4.5.3 Pengaruh DAK Terhadap Kemiskinan .....	46
4.5.4 Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan .....	46
4.5.5 Pengaruh PDRB per kapita Terhadap Kemiskinan .....	47
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI .....	48

5.1 Simpulan.....	48
5.2 Implikasi .....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	50
LAMPIRAN .....	53



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikator Desentralisasi Fiskal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020 (rupiah).....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2. 2 Perbedaan Indikator IPM Metode Lama dan Metode Baru Menurut UNDP.....	24
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	38
Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Model Regresi .....	39
Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow.....	40
Tabel 4. 4 Hasil Uji Hausman.....	40
Tabel 4. 5 Hasil Regresi Random Effect Model .....	41
Tabel 4. 6 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	42
Tabel 4. 7 Uji F.....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan per Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2020(%) .....2



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian .....	53
Lampiran 2 Hasil Regresi.....	66



## ABSTRAK

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk. Seseorang dapat dikatakan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020. Adapun dalam hal ini faktor yang memengaruhi kemiskinan adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dengan menggunakan pendekatan random effect. Hasil penelitiannya menunjukkan di mana variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemiskinan, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci : *Kemiskinan, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita.*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

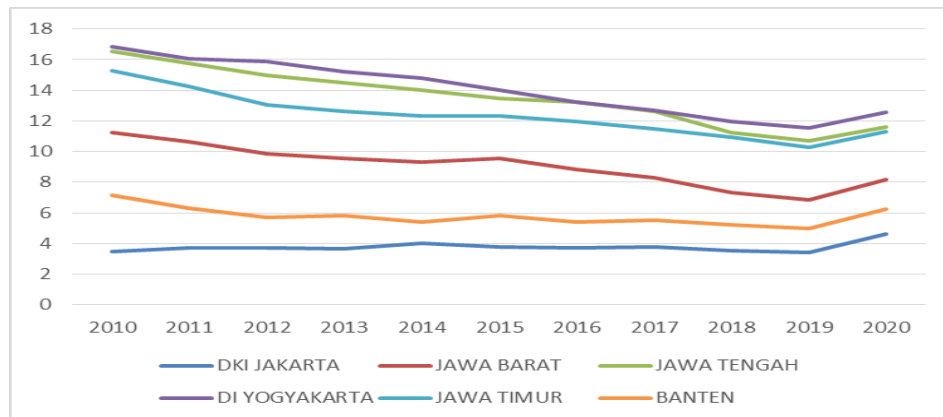
### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama makro ekonomi suatu negara, terutama di Indonesia. Menurut Todaro dan Smith kemiskinan merupakan penduduk yang hidup dalam keadaan kekurangan nutrisi dan memiliki tingkat kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang dimiliki masih rendah, dan memperoleh pendapatan yang rendah (Todaro & Smith, 2011, hal. 25)

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar diukur dari sisi pengeluaran penduduk. Seseorang dapat dikatakan masuk dalam kategori sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2010 garis kemiskinan Indonesia sebesar Rp 211.720/kapita/bulan dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp 486.168,000/kapita/bulan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Adanya batas garis kemiskinan dapat mengetahui jumlah penduduk miskin tahun 2010 sebesar 31,02 juta jiwa dan mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 26,50 juta jiwa. Diketahui bahwa proporsi jumlah penduduk miskin antar pulau di Indonesia di antaranya Pulau Jawa berkontribusi sebesar 22,1%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 7,8%, Pulau Sulawesi sebesar 7,55%, Pulau Kalimantan sebesar 3,6%) dan Papua dan Maluku sebesar 5,8%. Proporsi terbesar jumlah penduduk miskin di tahun 2021 yaitu Pulau Jawa (Badan Pusat Statistik, 2022)

Kondisi jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa dapat dijelaskan melalui tingkat kemiskinan yang perhitungannya dengan membandingkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduknya. Adanya perhitungan tersebut dapat menjelaskan kondisi kemiskinan setiap daerah yang memiliki perbedaan pada jumlah penduduknya. Dengan demikian tingkat kemiskinan pada tahun 2010-2020 berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa (Badan Pusat Statistik, 2022).



**Gambar 1. 1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan per Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2020(%)**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)*

Tabel diatas menjelaskan tingkat kemiskinan per Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010-2020 yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi pada Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, kedua provinsi tersebut terdapat perbedaan pada jumlah kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem merupakan keadaan di mana kesejahteraan masyarakat di bawah garis kemiskinan ekstrem yaitu sebesar USD 1.9 *purchasing power parity*. Pada tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu penyumbang penduduk miskin ekstrem sebesar 4,4%. Hal tersebut menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi yang diprioritaskan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah(Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2021).

Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah adalah dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, seperti halnya yang dinyatakan oleh Todaro dan Smith yaitu dengan menghambat penyebab kemiskinan. Menurut Todaro dan Smith penyebab terjadinya kemiskinan dikarenakan beberapa hal di antaranya laju pertumbuhan masih lambat, pendapatan per kapita rendah, distribusi pendapatan tidak merata, fasilitas dan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memiliki kualitas yang rendah (Todaro & Smith, 2011).

Hal tersebut menyebabkan pemerintah dalam menurunkan kemiskinan perlu adanya peningkatan kualitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Langkah mendasar

yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur yang menjadi implementasi dari desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal sebagai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan, pelayanan, peningkatan daya saing daerah dan peran masyarakat (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021)

Pengukuran dari kebijakan desentralisasi fiskal dapat dilihat melalui tiga indikator yang pertama dari sisi pendapatan berupa pendapatan asli daerah, kedua dari sisi transfer daerah berupa dana perimbangan dan yang ketiga dari sisi pengeluaran berupa belanja daerah. Berikut indikator dari desentralisasi fiskal:(Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021).

**Tabel 1. 1 Indikator Desentralisasi Fiskal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020 (rupiah)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Daerah
2010	4.785.133.227	1.811.657.949	6.839.385.978
2011	7.547.669.804	1.950.189.365	8.786.745.596
2012	6.629.308.010	2.318.806.100	12.402.215.659
2013	8.212.800.641	2.467.814.629	14.649.375.799
2014	9.916.358.231	2.542.626.745	16 846 898 289
2015	10.904.825.813	2.257.143.000	18.517.590.793
2016	11.541.029.720	8.017.297.595	19.354.374.825
2017	12.547.513.389	11.067.786.491	24.349.750.271
2018	13.711.836.038	10.933.776.832	26.231.235.039
2019	14.437.914.236	11.334.903.061	27.490.556.740
2020	15.993.530.006	12.214.821.794	29.106.574.743

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dari tahun 2010-2020, menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menggali potensi daerahnya. Dana perimbangan tahun 2010-2020 juga mengalami kenaikan yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Belanja daerah mengalami peningkatan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik (Sepulveda & Martinez-Vazquez, 2011).

Pada tiga indikator di atas menjabarkan tercapainya pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdapat pada tabel 1.1 terjadi peningkatan kepada keseluruhan indikator. Adanya peningkatan pada ketiga indikator akan mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Kondisi adanya peningkatan pembangunan dan pelayanan publik akan berpengaruh pada bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan (Sepulveda & Martinez-Vazquez, 2011).

Capaian pelaksanaan desentralisasi fiskal bidang kesehatan dan pendidikan tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia. Capaian pada bidang ekonomi dapat tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang menjabarkan hasil produksi per individu. Hal tersebut dapat menghambat dari penyebab kemiskinan sesuai pernyataan Todaro dan Smith pada peningkatan fasilitas bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Dengan demikian upaya pemerintah dalam menurunkan kemiskinan bergantung pada pernyataan Todaro dan Smith untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga tingkat kemiskinan di Provinsi di Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 9,925%. Akan tetapi, menurut Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 target tingkat kemiskinan sebesar 7,48%-6,48%, menjadikan target tingkat kemiskinan belum tercapai (rpnjd)

Hal tersebut menjadikan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh secara simultan PAD, DAU, DAK, IPM, dan PDRB per kapita terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020 ?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020 ?
4. Bagaimana pengaruh secara parsial Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020 ?
5. Bagaimana pengaruh secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020 ?
6. Bagaimana pengaruh secara parsial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis secara simultan PAD, DAU, DAK, IPM, dan PDRB per kapita terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.
2. Untuk menganalisis secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.
3. Untuk menganalisis secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.
4. Untuk menganalisis secara parsial Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.

5. Untuk menganalisis secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.
6. Untuk menganalisis secara parsial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis  
Diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi, serta penulis dapat memahami masalah ekonomi yang dihadapi sehingga mendorong penulis ikut serta berpikir kritis untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah tersebut.
2. Bagi pengambil kebijakan  
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat, serta memberikan informasi bagaimana efektivitas alokasi PAD, DAU, DAK serta kebijakan mengenai IPM dan PDRB per kapita yang telah dilakukan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.5 Sistematik Penulisan**

##### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini akan dijabarkan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

##### **BAB II Kajian Pustaka Dan Landasan Teori**

Dalam ini akan ada beberapa sub bab pembahasan yaitu

1. Kajian pustaka yang memaparkan kajian terdahulu untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini

2. Landasan teori yang berisikan teori-teori sebagai dasar dalam penelitian mengenai pemecahan masalah dana untuk melihat bagaimana hubungan antar variabel.
3. Kerangka pemikiran yang berisikan ringkasan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen
4. Hipotesis berisikan penjabaran terkait rumusan masalah sementara yang dibuat oleh peneliti dengan dasar teori dan penelitian terdahulu.

### **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitiannya

### **BAB IV Hasil Analisis Dan Pembahasan**

Pada bab ini akan berisi analisis dan pembahasan dari hasil pengujian yang telah dilakukan sesuai metode yang dijabarkan dalam bab III, kemudian pembahasan hasil tersebut akan disesuaikan dengan hipotesis pada bab II.

### **BAB V Simpulan dan Implikasi**

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang diambil oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitiannya, serta saran bagi pemerintah maupun penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bentuk referensi yang berasal dari penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai dasar untuk penelitian. Tujuan dilakukannya kajian pustaka adalah untuk menambah wawasan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun kajian penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Alifah Nur Fatimah menyebutkan dalam penelitiannya tentang Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Pada penelitian tersebut penulis menggunakan variabel indeks pembangunan manusia (IPM), PDRB per kapita, UMK (Upah Minimum Kabupaten) dan jumlah penduduk. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan estimasi akhir menggunakan *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (IPM), PDRB Per Kapita, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk UMK (Upah Minimum Kabupaten) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Fatimah, 2017).

Penelitian oleh Riza Amami dan Kiki Asmara menyebutkan dalam penelitiannya tentang Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan BM terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Pada penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal (BM). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut yaitu PAD tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, DAU berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, DAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dan BM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Amami & Asmara, 2022)



Penelitian oleh Wahyu Febri Dwiatmojo menyebutkan dalam penelitiannya tentang Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran, dan Inflasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan estimasi akhir menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil analisis yang ditemukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, PDRB dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Namun, Jumlah penduduk dan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan(Dwiatmojo, 2017).

Marianus Manek dan Rudy Badrudin menyebutkan dalam penelitiannya tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Data diolah dengan menggunakan varian berbasis SEM yang disebut WarpPLS. Hasil analisis dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD memiliki berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, PAD berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi sendiri tidak berpengaruh terhadap kemiskinan(Manek & Badrudin, 2017)

Setyo Novianto menyebutkan dalam penelitiannya tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, dan Pengangguran. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis data panel kombinasi antara deret waktu (time series) dengan analisis deret hitung (cross section). Model yang dipilih pada penelitian ini ialah *Random Effect Model*. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Untuk uji F IPM, Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran secara bersama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Novianto, 2019).

Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto menyebutkan dalam penelitiannya tentang Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel PDRB dan IPM. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis data panel dengan estimasi akhir menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil analisis dari penelitian tersebut menunjukkan PDRB dan IPM berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Indonesia(Suliswanto, 2012).

Radiatul Fadila, Marwan menyebutkan dalam penelitiannya tentang Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis data panel dengan estimasi akhir menggunakan *Random Effect Model*. Hasil analisis dari penelitian tersebut menunjukkan IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan pertumbuhan Ekonomi tidak terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat(Fadila & Marwan, 2020).

Arie Ismail dan Abdul Hakim menyebutkan dalam penelitiannya tentang Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Kesehatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis data panel dengan estimasi akhir menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil analisis dari penelitian tersebut menunjukkan DBH dan DAU memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan. DAK berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan. Jumlah Penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah kemiskinan, dikarenakan adanya peningkatan proporsi penduduk produktif akibat dari arus migrasi yang masuk ke Bali untuk mencari pekerjaan. Tingkat Pendidikan dan tingkat kesehatan berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan (Ismail & Hakim, 2014).

Arya Galuh Fatahillah menyebutkan dalam penelitiannya tentang Pengaruh PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (2012-2017). Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel PDRB, PAD, DAU, dan Pendidikan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis data panel dengan estimasi akhir menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil analisis dari penelitian tersebut menunjukkan PAD, DAU, dan Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Secara parsial PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan(Fatahillah, 2019).

T. Fahrurriza Putrayuda, Yulia Efni, Kamaliah tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan Di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015. Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan aplikasi Warp-Partial Least Square (Warp-PLS). Hasil analisis dari penelitian tersebut menunjukkan PAD memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. DAU tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Putrayuda et al., 2017).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Keterangan	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Alifah Nur Fatimah (2017) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.	PDRB per kapita, IPM dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan UMK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.	Persamaan menggunakan IPM dan PDRB per kapita, menggunakan metode penelitian regresi data panel. Perbedaan menggunakan jumlah penduduk dan UMK, tahun penelitian 2012-2016.

2	Wahyu Febri Dwiatmojo (2017) tentang Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015.	IPM tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, PDRB dan inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.	Persamaan menggunakan IPM dan alat analisis menggunakan regresi data panel. Perbedaan menggunakan inflasi, jumlah penduduk dan pengangguran.
3	Marianus Manek dan Rudi Badrudin (2016) tentang Pengaruh Pendapatan Asli dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, PAD berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.	Persamaan menggunakan PAD dan dana perimbangan. Perbedaan data diolah menggunakan varian berbasis SEM WarpPLS.
4	Riza Amamai dan Kiki Asmara (2022) tentang Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan BM Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi.	PAD tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, DAU berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, DAK dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.	Persamaannya adalah menggunakan PAD, DAU, DAK Perbedaannya adalah menggunakan belanja modal dan teknik analisis regresi linear berganda.
5	Setyo Novianto (2018) tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah	Pertumbuhan ekonomi, IPM dan inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.	Persamaannya adalah menggunakan metode analisis regresi data panel dan model terbaik adalah <i>random effect model</i> . Perbedaannya adalah menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran.

6	Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto (2010) tentang Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia	PDRB dan IPM berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan.	Persamaan menggunakan IPM dan PDRB, menggunakan alat analisis regresi data panel. Perbedaan penelitian ini berskala nasional dan menggunakan <i>time series</i> 2004-2010.
7	Radiatul Fadila dan Marwan (2020) tentang Pengaruh Indeks Pembangunan Nasional (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018.	IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.	Persamaan menggunakan IPM dan menggunakan model regresi data panel. Perbedaan menggunakan pertumbuhan ekonomi dan tidak menggunakan variabel PAD, DAU, DAK dan PDRB per kapita.
8	Ari Ismail dan Abdul Hakim (2014) tentang Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali.	DBH, DAU berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan DAK berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan.	Persamaan menggunakan variabel dana perimbangan dan menggunakan metode regresi data panel. Perbedaan menggunakan jumlah penduduk dan metode terbaiknya adalah <i>fixed effect model</i> .
9	Arya Galuh Fatahillah (2019) tentang Pengaruh PDRB, PAD, DAU, DAK dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.	PDRB berpengaruh positif terhadap kemiskinan. PAD dan DAU berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.	Persamaan menggunakan variabel PDRB, PAD, DAU dan menggunakan metode regresi data panel. Perbedaan menggunakan variabel pendidikan dan tidak menggunakan variabel DAK dan model estimasi yang dipakai <i>fixed effect model</i> .
10	T. Fahrurriza	PAD berpengaruh	Persamaan menggunakan

	Putrayuda, Yulia Efani dan Kamaliah (2017) tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi UMUM (DBH) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015	negatif terhadap tingkat kemiskinan. DAU dan DBH tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kemiskinan.	PAD, DAU, DAK sebagai variabel independen. Perbedaan menggunakan variabel DBH dan belanja modal, serta menggunakan metode analisis Partial Least Square (PLS).
--	---	--	--

Berdasarkan kajian di atas, penelitian yang menjadi dasar penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Arya Galuh Fatahillah (2019) dan Alifah Nur Fatimah (2017).

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Kemiskinan

Kemiskinan menjadi masalah penting yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan merupakan suatu hal di mana terdapat ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari pengeluarannya. Kemiskinan identik dengan kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki untuk mendapatkan pekerjaan.

#### 2.2.1.1 Penyebab Kemiskinan

Menurut Todaro dan Smith kemiskinan terjadi dikarenakan adanya interaksi antara beberapa karakteristik antara lain: (Todaro & Smith, 2011)

1. Tingkat pendapatan nasional di negara-negara berkembang masih rendah dan laju pertumbuhan masih lambat.

2. Negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang masih terbilang rendah dan pertumbuhannya sangat lambat bahkan mengalami stagnasi.
3. Distribusi pendapatan tidak merata.
4. Mayoritas kemiskinan yang dialami di negara berkembang adalah kemiskinan absolut
5. Ketersediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan masih terbatas dengan kualitas yang rendah, menyebabkan masyarakat banyak yang mengalami gizi buruk penyakit, sehingga menyebabkan tingkat kematian bayi tinggi.
6. Fasilitas pendidikan di negara berkembang memiliki kualitas yang relatif rendah dan kurikulum yang diterapkan kurang relevan.

#### **2.2.1.2 Ciri-ciri Kemiskinan**

Todaro dan Smith mengatakan, masyarakat dapat dikatakan miskin ketika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:(Todaro & Smith, 2011)

1. Adanya perbedaan derajat ketergantungan di dalam kekuatan ekonomi dan politik negara
2. Memiliki perbedaan struktur industri
3. Jumlah penduduk dan tingkat pendapatannya berbeda-beda
4. Terdapat perbedaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang rendah
5. Adanya perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negara.

#### **2.2.1.3 Bentuk Kemiskinan**

Menurut Suryawati berdasarkan kondisinya kemiskinan memiliki empat bentuk. Empat bentuk kemiskinan tersebut adalah(Suryawati, 2005)

1. Kemiskinan Absolut



Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi ketika pendapatan seseorang atau kelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga pendapatan tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan Kultural merupakan kemiskinan yang diakibatkan adanya sikap dan kebiasaan masyarakat yang biasanya berasal dari budaya dan adat istiadat yang tidak mau untuk mengubah pola hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya sikap malas, pemborosan, kurang kreatif, dan senang bergantung pada pihak lainnya.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural terjadi akibat rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi pada suatu tatanan sosial budaya maupun politik yang tidak mendukung adanya pembebasan kemiskinan

### 2.2.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi adanya kesenjangan fiskal antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, satu daerah dengan daerah lain, perbaikan pelayanan publik, menjadikan pemanfaatan sumber daya alam lebih efisien, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi fiskal juga dapat dipahami sebagai pelimpahan kewenangan pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, namun tetap diikuti transfer oleh pemerintah pusat. (Hastuti, 2018)



## **2.2.3 Sumber Penerimaan Daerah**

### **2.2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengukuran desentralisasi fiskal dari pendekatan pendapatan tercermin pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kementerian Keuangan PAD merupakan penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku guna mengumpulkan dana yang kemudian akan digunakan untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. PAD bersumber pada (Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022):

- 1) Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang diberikan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung. Iuran tersebut dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalam pajak daerah terdapat dua kewenangan:
  - a) Pajak Provinsi, terdiri atas:
    - i) Pajak Kendaraan Bermotor (BPK)
    - ii) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
    - iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
    - iv) Pajak atas Air Permukaan dan
    - v) Pajak Rokok.
  - b) Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
    - i) Pajak Hotel
    - ii) Pajak Restoran
    - iii) Pajak Hiburan
    - iv) Pajak Reklame
    - v) Pajak Penerangan Jalan
    - vi) Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
    - vii) Pajak Parkir
    - viii) Pajak Atas Air Tanah
    - ix) Pajak Sarang Burung Walet
    - x) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    - xi) Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2) Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dilakukan di setiap daerah sebagai bentuk pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu memiliki pengaruh khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah adalah :

a) Retribusi Jasa Umum

- i) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- ii) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- iii) Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu/Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- iv) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- v) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- vi) Retribusi Pelayanan pasar
- vii) Retribusi Pengajuan Kendaraan Bermotor
- viii) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- ix) Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta
- x) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- xi) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- xii) Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang
- xiii) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- xiv) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b) Retribusi Jasa Usaha

- i) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- ii) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- iii) Retribusi Tempat Pelelangan
- iv) Retribusi Terminal
- v) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- vi) Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Vila
- vii) Retribusi Rumah Potong Hewan
- viii) Retribusi Pelayanan Pelabuhan
- ix) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- x) Retribusi Penyeberangan di Air

- xi) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c) Retribusi Perizinan Tertentu
  - i) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - ii) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - iii) Retribusi Izin Gangguan
  - iv) Retribusi Izin Trayek
  - v) Retribusi Izin Usaha Perikanan
  - vi) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). (Berdasarkan PP No. 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - a) Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
  - b) Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank.
  - c) Bagian Laba Keuangan Non-Bank.
  - d) Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya.
  - e) Bagian Laba Atas Penyerahan Modal atau Investasi Kepada Pihak Ketiga.
- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah
 

Beberapa pendapatan asli daerah lain-lain yang sah terdiri dari :

  - a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan.
  - b) Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga, Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TGR).
  - c) Komisi.
  - d) Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah.
  - e) Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
  - f) Denda Pajak. g. Denda Retribusi.
  - g) Hasil Eksekusi atas Jaminan.
  - h) Pendapatan dari Pengembalian.
  - i) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dan lain sebagainya

### **2.2.3.2 Pendapatan Transfer**

Transfer ke daerah ini merupakan transfer dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN). Dana transfer ke daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mengurangi adanya kesenjangan pendanaan urusan pemerintah antar daerah, mengurangi adanya kesenjangan pelayanan publik yang ada di setiap daerah, dan menandai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Transfer daerah yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) yang juga disebut dana perimbangan (*Sumber-Sumber Penerimaan Daerah | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, n.d.*).

#### **1. Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU merupakan bentuk transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai salah satu alokasi APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan fiskal daerah. DAU juga digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Dana alokasi umum ditentukan dengan besar kecilnya celah fiskal suatu daerah. Celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan suatu daerah dengan potensi daerah. Alokasi DAU untuk daerah yang memiliki potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil, akan mendapatkan alokasi DAU yang kecil. Sebaliknya apabila daerah memiliki potensial kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar maka akan mendapatkan alokasi DAU yang lebih besar. Hal tersebut bertujuan agar pelayanan atas kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Konsep dasar formulasi DAU seperti yang tertera pada UU No.25 tahun 1999 secara implisit merupakan penjabaran dari teori governmental transfer berbasis pada konsep *fiscal gap*. Dalam konsep *fiscal gap* maka dapat diartikan bahwa kesenjangan fiskal merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (Mawarni, dkk, 2013).

DAU bersifat *block grand* maksudnya penggunaan DAU diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan tiap daerah dengan tujuan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebutuhan fiskal dapat diukur menggunakan variabel luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita, Indeks Kelemahan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Alokasi dasar diukur berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (Manek & Badrudin, 2017).

## **2. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan transfer dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan membantu daerah dalam mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004, 2004).

Dana Alokasi Khusus (DAK) diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, membiayai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah. DAU juga dapat digunakan untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kepulauan, daerah pesisir, perbatasan negara dengan negara lain, daerah tertinggal/ terpencil, termasuk kategori daerah ketahanan pangan. Sementara itu, prioritas alokasi DAK tahun 2006, ditetapkan masing-masing untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, bidang prasarana pemerintahan, dan lingkungan hidup (Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2005, 2005).

## **3. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan persentase. Tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DBH digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat dua jenis DBH yang ditransfer Pemerintah pusat kepada

Pemerintah daerah yaitu Dana bagi hasil pajak dan Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)(UU Nomor 33 Tahun 2004).

#### **4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Dana ini bersumber dari hibah dan dana darurat bertujuan untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD dan dana perimbangan. Hibah bersumber dari pemerintah negara asing, badan maupun lembaga internasional, pemerintah pusat, lembaga maupun badan dalam negeri atau perseorangan dalam bentuk devisa, rupiah, barang/jasa, dan tenaga ahli yang tidak perlu dibayarkan kembali. Dana darurat bersumber dari APBN yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan krisis solvabilitas(UU Nomor 33 Tahun 2004).

Dana desa juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN diberikan kepada desa melalui transfer APBD kabupaten/kota yang dialokasikan untuk membantu membiayai kegiatan pemerintah, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat(Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021).

#### **2.2.3 IPM**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari pendidikan, harapan hidup,dan standar hidup untuk seluruh negara. IPM digunakan untuk mengukur aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara merupakan negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. IPM juga digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan ekonomi suatu negara terhadap kualitas hidup pada negara tersebut(Badan Pusat Statistik, 2015).

Melalui publikasi laporan tahunan Human Development Report (HDR) tahun 1990 lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkenalkan IPM. UNDP memberikan penilaian kepada semua negara dari skala 0 (terendah) sampai 1 (tertinggi) dalam pembangunan manusia di negara tersebut. Beberapa premis penting pembangunan manusia di antaranya yaitu(Badan Pusat Statistik, 2015):

1. Memfokuskan pembangunan kepada penduduk
2. Pembangunan dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh sebab itu konsep pembangunan manusia harus fokus dan terpusat pada penduduk secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Dalam pembangunan manusia bukan hanya memperhatikan bagaimana upaya meningkatkan kemampuan manusia tetapi memperhatikan upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
4. Pembangunan manusia didukung oleh produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) memiliki tiga indikator utama yaitu

1. Indikator Kesehatan

Indikator kesehatan diukur menggunakan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Umur panjang dan hidup sehat sendiri digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). UHH merupakan jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

2. Indikator Pendidikan

Indikator Pendidikan diukur menggunakan dimensi pengetahuan. Pengetahuan sendiri diukur menggunakan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Suseda. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan dua variabel secara simultan yaitu variabel tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.



### 3. Indikator Ekonomi

Indikator ekonomi diukur menggunakan standar hidup yang layak. Standar hidup layak itu sendiri diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Kategori IPM berdasarkan UNDP terdapat empat kategori, di antaranya adalah:

1. Angka harapan hidup (Tahun) 25-85
2. Angka melek huruf (persen) 0-100
3. Rata-rata lama sekolah (Tahun) 0-15
4. Daya beli (Rupiah PPP) 300.000-732-720

Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 UNDP mengubah metodologi dalam perhitungan IPM. Berikut merupakan tabel perbandingan metode lama dengan metode yang baru menurut UNDP (BPS Indonesia, 2015) :

**Tabel 2. 2 Perbedaan Indikator IPM Metode Lama dan Metode Baru Menurut UNDP**

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur panjang dan hidup sehat	Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	Angka harapan hidup saat lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka melek huruf (AMH)	Harapan lama sekolah (HLS)
	Kombinasi angka partisipasi kasar (APK)	Rata-rata lama sekolah (RLS)
Standar hidup layak	PDRB per kapita	PNB per kapita
Agregasi	Rata-rata aritmatik	Rata-rata geometrik



#### 2.2.4 PDRB per kapita

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah seluruh nilai bersih atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan di suatu daerah. PDRB per kapita sendiri dapat dihitung dengan cara PDRB harga konstan dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah. Peningkatan PDRB per kapita diharapkan dapat memecahkan masalah seperti kemiskinan, pengangguran serta ketimpangan distribusi pendapatan. Berdasarkan PDRB per Kapita dapat diketahui besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya maka semakin besar kemungkinan bagi suatu daerah untuk tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduknya juga tinggi (Fatimah, 2017).

Rumus PDRB per kapita:

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

#### 2.2.5 Hubungan Antar Variabel

##### 2.2.6.1 Hubungan Antara PAD Terhadap Kemiskinan

Pendapatan Asli Daerah yang dialokasikan seoptimal mungkin maka dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pendapatan Asli Daerah yang semakin besar dan merata mendorong kemampuan daerah untuk menggali potensi daerahnya dari berbagai sektor. Hal tersebut menjadikan daya tarik daerahnya untuk menarik investor untuk meningkatkan potensi daerah. Dengan demikian, akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga kemiskinan turun.

Dengan demikian apabila PAD berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yaitu PAD mengalami peningkatan akan menurunkan kemiskinan. Terdapat penelitian yang sejalan dengan pernyataan tersebut yaitu (Koto, 2016) dan (Meilen Greri Paseki, Amran Naukoko, 2014) yang menjelaskan kenaikan PAD akan mengurangi jumlah penduduk miskin karena alokasi PAD dapat digunakan untuk

membayai program-program pengentasan kemiskinan sehingga dengan peningkatan jumlah PAD akan bisa menurunkan jumlah penduduk miskin.

#### **2.2.6.2 Hubungan Antara DAU Terhadap Kemiskinan**

Dana Alokasi Umum digunakan membantu daerah untuk pendanaan keuangan daerah agar tidak terjadi kesenjangan fiskal antar daerah. Hal tersebut menjadikan pemerataan fiskal yang akan meningkatkan pelayanan publik yang merata antar daerah. Kondisi tersebut menghambat dari penyebab kemiskinan menurut Todaro dan Smith yang menyatakan peningkatan pada pelayanan dan fasilitas publik terutama pada bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian DAU berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yaitu DAU mengalami peningkatan akan menurunkan kemiskinan. Terdapat penelitian yang sejalan dengan pernyataan tersebut yaitu (Amami & Asmara, 2022) dan (Ismail & Hakim, 2014) yang menjelaskan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dana alokasi umum akan membantu mendanai pembangunan pelayanan publik yang akan mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menurunkan kemiskinan

#### **2.2.6.3 Hubungan Antara DAK Terhadap Kemiskinan**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu bentuk implementasi dari desentralisasi berupa transfer dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK akan membantu pemerintah daerah dalam berkontribusi mempercepat target pembangunan infrastruktur nasional. Dengan adanya kemajuan infrastruktur maka akses pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi semakin mudah sehingga akan kualitas standar hidup masyarakat maka kemiskinan menurun.

Dengan demikian DAK berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yaitu DAK mengalami peningkatan akan menurunkan kemiskinan. Terdapat penelitian yang sejalan dengan pernyataan tersebut yaitu (Basyir dkk., 2015) dan (Rhokayyah & Widyanti, 2019) menjelaskan dana alokasi khusus yang dialokasikan pada kegiatan

pembangunan, pengadaan akan meningkatkan pelayanan publik sehingga akan menurunkan kemiskinan.

#### **2.2.6.4 Hubungan Antara IPM Terhadap Kemiskinan**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan upaya memperluas pilihan manusia dalam memenuhi segala kebutuhan dasar hidupnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok. Dengan demikian, IPM yang memiliki peningkatan maka standar hidup masyarakat meningkat terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut menjadikan hambatan dalam penyebab kemiskinan menurut Todaro dan Smith.

Dengan demikian IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yaitu IPM mengalami peningkatan akan menurunkan kemiskinan. Terdapat penelitian yang sejalan dengan pernyataan tersebut yaitu (Suliswanto, 2012) menjelaskan bahwa sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu fokus kemiskinan yang dipecahkan adalah kemiskinan yang menimpa pada individu dengan memenuhi kebutuhan pokoknya seperti kebutuhan kesehatan serta pendidikan dan mendorong terpenuhinya kebutuhan sekunder maupun tersier tiap individu.

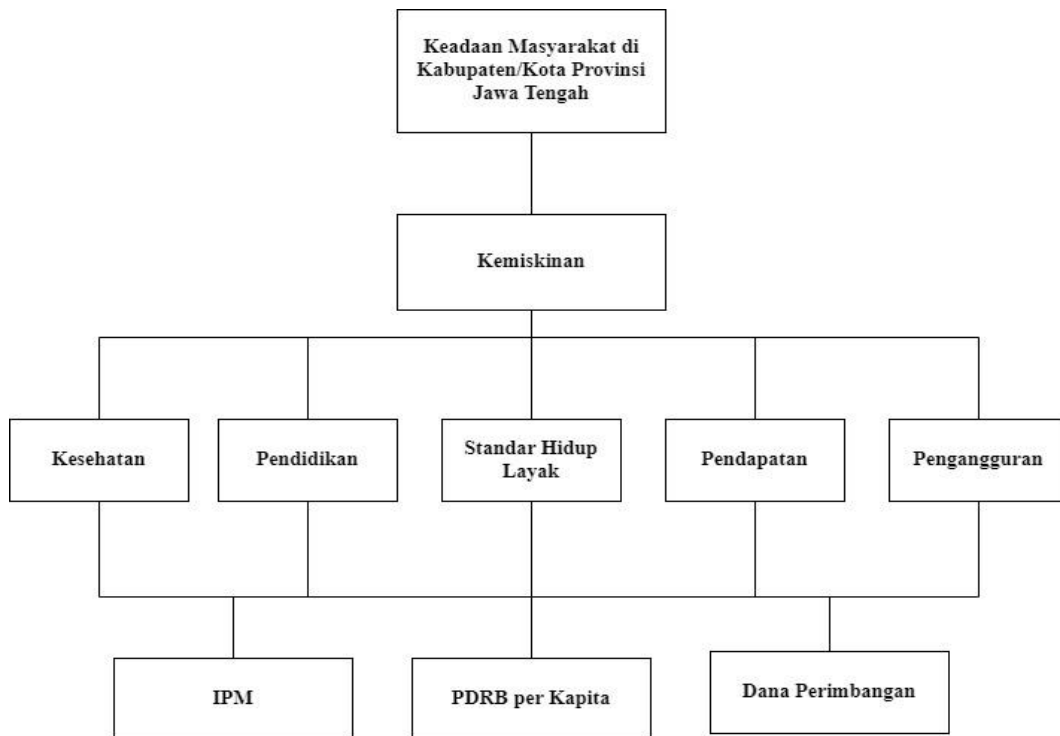
#### **2.2.6.5 Hubungan Antara PDRB Per Kapita Terhadap Kemiskinan**

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu pada daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut sehingga mencerminkan rata-rata pendapatan masyarakat. Adanya peningkatan PDRB per kapita menjadikan standar hidup masyarakat meningkat menjadikan keluar dari garis kemiskinan. Hal tersebut sesuai Todaro dan Smith salah satu penyebab kemiskinan adalah pendapatan per kapita yang rendah sehingga kenaikan PDRB per kapita akan menurunkan kemiskinan.

Dengan demikian PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yaitu PDRB per kapita mengalami peningkatan akan menurunkan kemiskinan. Terdapat penelitian yang sejalan dengan pernyataan tersebut yaitu (Fatimah, 2017) dan (Dwiatmojo, 2017) menjelaskan bahwa apabila pendapatan per kapita masyarakat

meningkat maka konsumsi akan meningkat juga, sehingga terjadi peningkatan dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan atas kebutuhan pokok masyarakat akan menurunkan kemiskinan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian yang telah dilakukan adalah

1. Secara simultan diperkirakan variabel PAD, DAU, DAK, IPM, dan PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.
2. Secara parsial diperkirakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.
3. Secara parsial diperkirakan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.

4. Secara parsial diperkirakan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.
5. Secara parsial diperkirakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020
6. Secara parsial diperkirakan PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berupa angka atau bilangan dan dapat diukur maupun dihitung secara langsung. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan dalam analisis penelitian ini meliputi data time series tahun 2010-2020 dan data cross section 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah .

Dalam penelitian ini menggunakan 6 variabel data antara lain tingkat Kemiskinan kabupaten dan kota Di Provinsi Jawa Tengah, datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dalam satuan angka, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dalam satuan angka, Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dalam satuan angka, Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dalam satuan angka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten dan di Provinsi Jawa Tengah, datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dalam satuan persen, Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB perkapita) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dalam satuan persen.

#### **3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Ada dua jenis data yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu variabel *dependen* atau variabel terikat dan variabel *independen* atau variabel bebas. Variabel *dependen* merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel *independen*, sedangkan variabel *independen* merupakan variabel yang memengaruhi variabel *dependen*. Penelitian ini menggunakan satu variabel *dependen* dan lima variabel *independen*.

Data sekunder dalam penelitian digunakan untuk melihat variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu variabel ketimpangan pendapatan. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini meliputi PAD, DAU, DAK, DBH dan Dana Desa.

### **3.2.1 Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang diukur melalui sisi pengeluaran. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikalkulasikan berdasarkan data tahunan dan dinyatakan dalam bentuk persen.

### **3.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang didapat oleh suatu daerah dari hasil menghitung sumber-sumber dana yang ada dan diperuntukkan untuk keperluan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh daerah. Pendapatan Asli daerah diperoleh dari sektor retribusi daerah hasil retribusi milik daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh daerah dll. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinyatakan dalam juta rupiah.

### **3.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum merupakan sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setiap tahunnya dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi dana ini merupakan salah satu bentuk realisasi adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinyatakan dalam juta rupiah.

### 3.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setiap tahunnya yang digunakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus daerah sesuai dengan prioritas nasional. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinyatakan dalam juta rupiah.

### 3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan sebagai alat pengukur pencapaian pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah. IPM memang tidak dapat mengukur dimensi pembangunan manusia secara keseluruhan, tetapi IPM dapat mengukur pokok pembangunan manusia yang dapat mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Kemampuan dasar tersebut yaitu umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi. Data IPM yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinyatakan dalam satuan persen.

### 3.2.6 PDRB per kapita

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah dari seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau jumlah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai kegiatan perekonomian di daerah tertentu, dalam satu periode tertentu. PDRB per kapita sendiri dihitung dengan cara PDRB harga konstan dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah.

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah penduduk}}$$



PDRB per kapita yang digunakan yaitu PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Data PDRB per kapita yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinyatakan dalam satuan persen.

### 3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi data panel dilakukan dengan menggabungkan data time series dan data cross section. Menurut Hsiao (1992) penggunaan data panel memiliki keunggulan yaitu dapat memperoleh hasil estimasi yang lebih baik karena apabila jumlah observasi mengalami peningkatan secara otomatis akan berpengaruh pada peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan menghindari kesalahan penghilangan variabel.

Variabel independen yang digunakan yaitu PAD, DAU, DAK, DBH, Dana Desa. Variabel dependen yang digunakan yaitu Kemiskinan. Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan persamaan sebagai berikut

$$\text{Kemiskinan} = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$$

Persamaan yang digunakan yaitu:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it} \dots \dots (2)$$

$Y_i$  = Kemiskinan (persen)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = Koefisien variabel independen

$X_1$  = PAD (juta rupiah)

$X_2$  = DAU (juta rupiah)

$X_3$  = DAK (juta rupiah)

$X_4$  = IPM (persen)

$X_5$  = PDRB per kapita (persen)

Menurut persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam analisis ini variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh variabel independen (X1, X2, X3, X4, X4)

### 3.4 Estimasi Model Regresi Data Panel

Estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu dengan menggunakan *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan menggunakan *Random Effect Model (REM)* (Widarjono, 2013).

#### 3.4.1 *Common Effect Model (CEM)*

Metode pendekatan *Common Effect* merupakan teknik estimasi data panel yang paling sederhana di mana hanya dengan mengombinasikan data time series dan cross section. Apabila kita hanya menggabungkan data yang kita miliki tanpa melihat perbedaan waktu dan individu maka dapat menggunakan metode OLS dalam mengestimasi model data panel. Pendekatan common effect mengasumsikan bahwa perilaku antara individu maupun waktu sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2013). Persamaan Model *common effect* adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \dots \dots (2)$$

#### 3.4.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Di Dalam model *fixed effect* diasumsikan terdapat efek yang memiliki perbedaan antar individu. Oleh karena itu, model ini merupakan parameter yang tidak diketahui dan selanjutnya akan dilakukan estimasi dengan teknik variabel dummy. Di Dalam model FEM ini kita dapat menggunakan variabel dummy sebagai alat untuk mengestimasi data panel yang akan kita teliti. Model estimasi ini dikenal dengan teknik *Least Squares Dummy Variables (LSDV)* (Widarjono, 2013). Persamaan model *fixed effect* adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 D_{4it} + \beta_5 D_{5it} + \beta_6 D_{6it} + e_{it} \dots \dots (3)$$

#### 3.4.3 *Random Effect Model (REM)*

Metode *Random effect* memperkirakan bahwa masing-masing perusahaan memiliki intersep yang berbeda, di mana intersep tersebut merupakan variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna apabila individu yang digunakan

sebagai sampel diambil secara acak dan mewakili populasi. Metode ini juga mampu memperkirakan bahwa *error* bisa terjadi berkorelasi dengan *cross section* dan *time series*. Model *random effect* sering disebut juga sebagai *Error Component Model (ECM)*. Dikarenakan interferensi antar variabel, teknik model OLS tidak efisien dalam estimator, sehingga metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effect* yaitu *Generalized Least Squares (GLS)*. Persamaan model *random effect* adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it} \dots \dots (4)$$

### 3.5 Pemilihan Model Terbaik

Pada saat menentukan model yang akan digunakan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal tersebut dilakukan untuk memilih model yang tepat. Maka perlu dilakukan beberapa model pengujian agar mendapatkan model terbaik. Metode pengujian yang dapat dilakukan yaitu :

#### 3.5.1 *Chow Test* ( Uji Chow)

Uji Chow merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan model *common effect* atau model *fixed effect*. Hipotesis yang digunakan dalam uji chow adalah sebagai berikut:

H0 : *Common Effect Model (CEM)*

H1 : *Fixed Effect Model (FEM)*

Dengan asumsi sebagai berikut:

1. H0 diterima apabila probabilitas > (alpha) yang artinya model terbaik yang digunakan adalah *Common Effect Model (CEM)*
2. H1 diterima apabila probabilitas < (alpha) yang artinya model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

### 3.5.2 Hausman Test

Uji Hausman merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam uji hausman adalah sebagai berikut:

1.  $H_0$  : *Random Effect Model (REM)*
2.  $H_1$  : *Fixed Random Model (FEM)*

Dengan asumsi sebagai berikut:

1.  $H_0$  diterima apabila probabilitas  $> (\alpha)$  yang artinya model terbaik yang digunakan adalah *Random Effect Model (REM)*
2.  $H_1$  diterima apabila probabilitas  $< (\alpha)$  yang artinya model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Apabila kita menolak hipotesis nol dan statistik hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang paling tepat untuk digunakan yaitu model *fixed effect*, sedangkan apabila kita gagal dan menolak hipotesis nol yaitu pada saat nilai statistik hausmannya lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang paling tepat untuk digunakan yaitu model *random effect* ( widarjono, 2013).

### 3.6 Uji Statistik

Dalam penelitian ini menggunakan tiga uji statistik yaitu Uji koefisien Regresi Parsial (Uji T-Statistik), Uji Koefisien Regresi Bersama ( Uji F ), dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) / R-Squared.

#### 3.6.1 Uji T-Statistik

Uji T-Statistik digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis Uji T-Statistik yaitu:

1. Hipotesis negatif :

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_a : \beta_i < 0$$

2. Hipotesis positif :

$$H_0 : \beta = 0$$

$$H_a : \beta > 0$$

Dengan asumsi:

1. Jika Probab T-statistic  $> (\alpha)$  , maka dapat disimpulkan menerima  $H_0$  dan tidak terdapat adanya pengaruh secara signifikan variabel independen terhadap variabel dependen
2. Jika Probab T-statistic  $< (\alpha)$ , maka dapat disimpulkan menolak  $H_0$  dan terdapat adanya pengaruh secara signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.6.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji hipotesis koefisien regresi (slope) secara bersamaan untuk memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis uji F yaitu:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$  , tidak terdapat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq 0$  , Terdapat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

F hitung  $>$  F tabel artinya menerima  $H_0$

F hitung  $<$  F tabel artinya menolak  $H_0$  atau menerima  $H_1$

### 3.6.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) / R-Squared

Dilakukannya Uji Koefisien Determinasi atau R-square bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Maka semakin tinggi nilai R-square maka dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen bisa dikatakan memiliki hubungan yang signifikan.

## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data

Dalam penelitian ini tipe data yang digunakan meliputi data sekunder jenis data panel dalam kurun waktu 6 tahun dihitung mulai tahun 2015 hingga tahun 2020 pada 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Data yang digunakan bersumber dari lembaga khusus seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel kemiskinan yang digunakan sebagai variabel dependen dan variabel PAD, DAU, DAK, DBH, Dana Desa sebagai variabel Independen nya.

**Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	Mean	Maximum	Minimum	Standar Deviasi	N
Kemiskinan (Persen)	12,99	24,58	3,98	4,485856327	385
PAD (juta rupiah)	267272.0135	2516646.593	12526.538	2477978.039	385
DAU (juta rupiah)	77771709.07	1373971.809	83609.874	274083472.9	385
DAK (juta rupiah)	168085041	543730.018	3750.1	135275.0218	385
IPM (persen)	69,88	83,19	58,64	4.925430021	385
PDRB per kapita (persen)	24,78	84,46	8,93	16.30962409	385

*Sumber : Hasil olah data excel*

Pada tabel 4.1 rata-rata kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,9 persen kemudian kemiskinan tertinggi di Kabupaten Purbalingga sebesar 24,58 persen pada tahun 2010, kemiskinan terendah terdapat di Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar 3,98. Rata-rata pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 267272.0135 juta rupiah, pendapatan asli daerah tertinggi terdapat di Kota Semarang pada tahun 2020 sebesar 2516646.593 juta rupiah, pendapatan asli daerah terendah terdapat di Kabupaten Pati sebesar 12526.538 juta rupiah.

Rata-rata dana alokasi umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 77771709.07 juta rupiah, dana alokasi umum tertinggi terdapat di Kabupaten Banyumas tahun 2017 sebesar 1373971.809 juta rupiah, dana alokasi umum terendah terdapat di Kabupaten Banyumas tahun 2011 sebesar 83609.874 juta rupiah. Sedangkan rata-rata dana alokasi khusus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 168085.041 juta rupiah, dana alokasi khusus tertinggi terdapat di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 543730.018 juta rupiah, dana alokasi khusus terendah terdapat di Kota Surakarta 2015 sebesar 3750.1 juta rupiah

Rata-rata indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,88 persen, indeks pembangunan manusia tertinggi terdapat di Kota Semarang tahun 2019 sebesar 83,19 persen, indeks pembangunan manusia terendah terdapat di Kabupaten pemalang tahun 2010 sebesar 58,64 persen. Sedangkan rata-rata PDRB per kapita Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 24,78 persen, PDRB per kapita tertinggi terdapat di Kabupaten Kudus tahun 2019 sebesar 84,46 persen, PDRB per kapita terendah terdapat di Kabupaten Pemalang 2010 sebesar 8,93 persen.

#### 4.2 Pemilihan Model Regresi

**Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Model Regresi**

	Model 1 (Common Effect Model (CEM))		Model 2 (Fixed Effect Model (FEM))		Model 3 (Random Effect Model (REM))	
	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.
C	52.035939	0.0000	67.22149	0.0000	65.48063	0.0000
PAD	-6.0962398	0.9414	1.660271	0.0018	1.547301	0.0020
DAU	-5.2998963	0.4051	2.242773	0.2614	1.900618	0.3368
DAK	-3.7494908	0.7873	-2.2892335	0.0003	-2.455594	0.0001
IPM	-0.5392413	0.0000	-0.7676314	0.0000	-0.741107	0.0000
PDRB_PRK PT	-0.0500385	0.0004	-0.0266253	0.2825	-0.128721	0.1760
R-squared	0.537562		0.963828		0.766405	
Adjust R- square	0.531461		0.959739		0.763323	
F-Statistic	88.11385		235.7091		248.6930	
Prob. F- Statistic	0.000000		0.000000		0.000000	

Sumber : Hasil olah data Eviews 10

Dari hasil pengujian tiga model di atas, maka selanjutnya akan dilakukan pemilihan model terbaik menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman.

#### 4.2.1 Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih antara Common EM dan FEM

H0 : memilih menggunakan metode estimasi common effect

H1 : memilih menggunakan metode estimasi fixed effect

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow**

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	119.575696	(34,345)	0.0000
Cross-section Chi square	981.063016	34	0.0000

*Sumber : Hasil olah data Eviews 10*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai probabilitas Cross-section Chi square sebesar  $0.0000 < 0.05$  persen, maka menolak H0 yang berarti model yang tepat digunakan adalah model *Fixed Effect Model*.

#### 4.2.2 Uji Hausman

Uji Chow dilakukan untuk memilih antara Uji FEM dan Uji REM

H0 :model yang digunakan random effect

H1 :model yang digunakan fixed effect

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Hausman**

Effect Test	Chi-sq.Statistic	d.f	Prob.
Cross-section random	8.587507	5	0.1267

*Sumber : Hasil olah data Eviews 10*



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai probabilitas Cross-section random sebesar  $0.1267 > 0.05$  persen, maka gagal menolak  $H_0$  yang berarti model yang tepat digunakan adalah model *Random Effect Model*.

### 4.3 Hasil Regresi Terbaik

Dapat kita lihat hasil dari uji hausman pada tabel 4.4 probabilitas Cross-section random sebesar  $0.1267 > 0.05$  persen, sehingga dalam penelitian ini model yang akan digunakan adalah *Random Effect Model*.

**Tabel 4. 5 Hasil Regresi Random Effect Model**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.48063	3.2223715	20.31216	0.0000
PAD	1.547301	4.973157	3.111306	0.0020
DAU	1.900618	1.976069	0.961818	0.3368
DAK	-2.455594	6.069957	-4.045489	0.0001
IPM	-0.741107	0.050308	-14.73153	0.0000
PDRB_PRKPT	-0.128721	0.021185	-1.355707	0.1760
R-squared	0.766405			
Adjust R-square	0.763323			
F-Statistic	248..6930			
Prob. F-Statistic	0.000000			

Sumber : Hasil olah data Eviews 10

#### 4.4 Uji Hipotesis

##### 4.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 4. 6 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Variabel	Adjust R-square
Pendapatan Asli Daerah	0.763323
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Khusus	
Indeks Pembangunan Manusia	
PDRB Perkapita	

Sumber : Hasil olah data Eviews 10

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan model terpilih yaitu *random effect model* nilai R-square sebesar 0.766405 . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, IPM, PDRB per kapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 76,6 persen sedangkan 23,4 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

##### 4.4.2 Uji F

Uji F merupakan suatu pengujian yang dilakukan agar mengetahui apakah dalam sebuah penelitian terdapat adanya pengaruh secara simultan antara variabel dependen dengan variabel independen. Seperti halnya pada Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, Indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita sebagai variabel independen terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagai variabel dependen. Hal ini diketahui dengan cara membandingkan antara probabilitas nilai uji F dengan alpha 0.05 persen.

**Tabel 4. 7 Uji F**

Variabel	F-Statistik	F-Probabilitas
Pendapatan asli daerah	248.6930	0.000000
Dana alokasi umum		
Dana alokasi khusus		
Indeks pembangunan manusia		
PDRB per kapita		

*Sumber : Hasil olah data Eviews 10*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan model terpilih yaitu *random effect model* maka diketahui nilai probabilitas sebesar  $0.000000 < \alpha 0.05$  menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia, dan PDRB per kapita berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen kemiskinan.

#### **4.4.3 Uji T**

##### **1. Jumlah PAD (X1)**

Menurut hasil estimasi regresi menggunakan *Random effect model* diketahui koefisien sebesar 1.547301 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0020 < \alpha = 5$  persen maka PAD (X1) signifikan dan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Apabila PAD naik 1 juta rupiah maka kemiskinan naik 1,547301 persen

##### **2. Jumlah DAU (X2)**

Menurut hasil estimasi regresi menggunakan *Random effect model* diketahui koefisien sebesar 1.900618 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.3368 > \alpha = 5$  persen.

Artinya yaitu variabel independen DAU (X2) tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

### **3. Jumlah DAK (X3)**

Menurut hasil estimasi regresi menggunakan *Random effect model* diketahui koefisien sebesar -2.455594 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0001 < \alpha = 5$  persen. Artinya yaitu variabel independen DAK (X3) signifikan dan berpengaruh negatif terhadap variabel dependen kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Apabila DAK naik 1 juta rupiah maka kemiskinan turun 2.455594 persen.

### **4. Jumlah IPM (X4)**

Menurut hasil estimasi regresi menggunakan *Random effect model* diketahui koefisien sebesar -0.741107 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0000 < \alpha = 5$  persen. Artinya yaitu variabel independen IPM (X4) signifikan dan berpengaruh negatif terhadap variabel dependen kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Apabila IPM naik 1 persen maka kemiskinan turun 0.741107 persen.

### **5. Jumlah PDRB per kapita (X5)**

Menurut hasil estimasi regresi menggunakan *Random effect model* diketahui koefisien sebesar -0.128721 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.1760 > \alpha = 5$  persen. Artinya yaitu variabel independen PDRB per kapita (X5) tidak signifikan terhadap variabel dependen kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

## **4.5 Analisis Ekonomi**

### **4.5.1 Pengaruh PAD Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan *random effect model*, diketahui nilai koefisien sebesar 1.547301 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0020 < \alpha = 5$  persen, sehingga PAD memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Apabila PAD naik 1 juta rupiah maka kemiskinan naik 1,547301 persen. Akan tetapi hasil tersebut tidak sesuai hipotesis dikarenakan alokasi PAD tidak menyentuh secara langsung kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah yang besar tidak dialokasikan untuk menggali potensi daerah sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Manduapessy, 2020) dan (Pujiati, 2008) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa PAD diduga searah secara langsung merangsang kemiskinan dan diduga searah secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi memengaruhi kemiskinan.

Selama ini pemerintah-pemerintah daerah (kabupaten dan kota) bisa dikatakan keliru dalam memaknai desentralisasi fiskal. Tidak efektifnya berbagai perundangan baru yang dikeluarkan menunjukkan tidak sensitifnya pemerintah terhadap berbagai kekuatan lokal yang dimiliki. Seharusnya pemerintah mampu mengimbangi berbagai produk baru tersebut dengan pengembangan potensi ekonomi lokal, misal dengan memberikan peluang yang lebih luas kepada investor. Dibutuhkan kepekaan yang tinggi terhadap berbagai kebutuhan investor untuk meningkatkan aktivitas investasi ini. Tingginya aktivitas ini akan memberikan tambahan penerimaan daerah setempat (Dwirandra, 2013). Pajak rokok yang diberlakukan juga meberatkan masyarakat, dimana orang miskin lebih memilih untuk membeli rokok daripada membeli bahan makanan.

#### **4.5.2 Pengaruh DAU Terhadap Kemiskinan,**

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan random effect model, diketahui nilai koefisien sebesar 1.900618 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.3368 > \alpha = 5$  persen, sehingga variabel independen DAU tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis dikarenakan DAU lebih banyak dialokasikan oleh pemerintah untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut menyebabkan alokasi DAU untuk pembangunan pelayanan publik kecil. Dana alokasi umum yang digunakan untuk belanja pegawai tidak dapat secara langsung menyentuh masyarakat, sehingga tidak berpengaruh terhadap perubahan kondisi masyarakat miskin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fikri et al., 2019) dan (Istimal, 2012). Hasil penelitian membuktikan bahwa pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sepertinya belum efektif menggunakan DAU

sebagai instrumen pengurangan angka kemiskinan. Alokasi DAU lebih banyak digunakan untuk gaji aparatur sipil negara sehingga tidak berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Aliran DAU sebaiknya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius agar percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar dapat terpenuhi.

#### **4.5.3 Pengaruh DAK Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan random effect model, diketahui nilai koefisien sebesar -2.455594 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0001 < \alpha = 5$  persen, sehingga variabel independen DAK signifikan dan berpengaruh negatif terhadap variabel dependen kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amami & Asmara, 2022) dan (Fatahillah, 2019). Hasil penelitian menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Tingginya anggaran DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah ini mampu membantu upaya penanggulangan kesenjangan antar daerah. DAK yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan ini dapat menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah telah dikelola sesuai dengan tujuan desentralisasi yaitu kesejahteraan dan kemajuan daerah, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang belum merata.

#### **4.5.4 Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan random effect model, diketahui nilai koefisien sebesar -0.741107 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0000 < \alpha = 5$  persen, sehingga variabel independen IPM signifikan dan berpengaruh negatif terhadap variabel dependen kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah, 2017) dan (Suliswanto, 2012). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara IPM dengan kemiskinan. Semakin tinggi atau

semakin baik kualitas pendidikan, kesehatan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok maka IPM semakin tinggi. Jika IPM di suatu daerah semakin tinggi maka kualitas sumber daya manusia pada daerah tersebut juga tinggi sehingga mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

#### **4.5.5 Pengaruh PDRB per kapita Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan random effect model, diketahui nilai koefisien sebesar -0.128721 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.1760 > \alpha = 5$  persen, sehingga variabel independen PDRB per kapita tidak signifikan terhadap variabel dependen kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis. Pendorong kenaikan pendapatan yaitu pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan. Sumber daya ekonomi yang belum fokus pada penciptaan lapangan kerja, SDM yang masih rendah, kebijakan upah minimum, dan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang belum optimal. Apabila hal tersebut terus ditingkatkan maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan terjadi kenaikan PDRB per kapita yang akan mengurangi kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh dan penelitian oleh (Fatahillah, 2019). Hasil penelitian menjelaskan bahwa kenaikan BDPB tidak selalu diikuti dengan penurunan kemiskinan. Diketahui di Jawa Tengah kontribusi terhadap PDRB terbesar terdapat pada sektor industri padat modal, sehingga dalam kegiatan produksinya lebih banyak faktor produksi modal dibandingkan dengan faktor produksi tenaga kerja. Hal tersebut menyebabkan peningkatan PDRB tidak pengaruh terhadap kemiskinan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang antara variabel dependen dengan variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita dengan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2020, maka terdapat beberapa kesimpulan antara lain:

1. Secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menjelaskan bahwa peningkatan atau penurunan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah.
3. Dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menjelaskan bahwa peningkatan atau penurunan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tidak dipengaruhi oleh dana alokasi umum.
4. Dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh negatif terhadap variabel dependen kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menjelaskan bahwa peningkatan atau penurunan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh dana alokasi khusus.
5. Indeks pembangunan manusia secara parsial berpengaruh negatif terhadap variabel dependen kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menjelaskan bahwa peningkatan atau penurunan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia.



6. PDRB per kapita secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menjelaskan bahwa peningkatan atau penurunan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tidak dipengaruhi oleh PDRB per kapita.

## **5.2 Implikasi**

1. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih kepada pengembangan usaha mikro kecil dan usaha mikro kecil menengah agar dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat
2. Untuk mengatasi kemiskinan maka perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu diharapkan pemerintah mempertahankan dan meningkatkan realisasi dana alokasi khusus dan IPM melalui upaya meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
3. Mudahnya investor untuk masuk akan memberikan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, maka seyogyanya pemerintah mengkaji kebalik peraturan di mana memudahkan investor asing untuk masuk yang nantinya diharapkan mendorong terciptanya lapangan usaha maupun pekerjaan baru dan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat.
4. Pemerintah dapat meningkatkan realisasi PAD dana mengalokasikan dan PAD kepada kebijakan yang pro kemiskinan

## DAFTAR PUSTAKA

- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11, 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia 2015*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Basyir, Hamzah, A., & Syahnur, S. (2015). *Jurnal Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan Di Aceh*. 3(1), 57–70.
- BPS Indonesia. (2015). Indeks Pembangunan manusia (Metode Baru). *Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015*(September), 90. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>
- Dwiatmojo, W. F. (2017). *ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015*. 1–14.
- Dwirandra, A. A. N. B. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Keserasian Belanja Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 66–74.
- Fadila, R., & Marwan. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 120. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8531>
- Fatahillah, A. G. (2019). *Pengaruh PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (2012-2017)*.
- Fatimah, A. N. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*.
- Fikri, K., Sudraja, U., & Remofa, Y. (2019). *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu*.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 785–787. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 16(9), 2168. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol16.iss9.art8>
- Istimal. (2012). *Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kota Tangerang*.

- Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah?*  
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>
- koto, jolianis. (2016). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Economica*, 4(2), 193–216.  
<https://doi.org/10.22202/economica.v4i2.633>
- Mandupessy, R. L. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Mimika.*
- Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81–98.  
<https://doi.org/10.35917/tb.v17i2.49>
- Mawarni. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2, 80–90.
- Meilen Greri Paseki, Amran Naukoko, P. W. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3), 30–42.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/5460>
- Novianto, S. (2019). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.*
- Pujiati, A. (2008). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 61–70. <https://doi.org/10.20885/vol13iss2aa221>
- Putrayuda, T. F., Efni, Y., & Kamilah. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, IX(3), 198–224.
- Rhokayyah, S., & Widyanti, R. (2019). *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan Pada Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2015-2019.*
- Sepulveda, C. F., & Martinez-Vazquez, J. (2011). The consequences of fiscal decentralization on poverty and income equality. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 29(2), 321–343. <https://doi.org/10.1068/c1033r>
- Suliswanto, M. S. W. (2012). Pengaruh produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia. *Ub Malang*, 3, 3.

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH | Badan Pendapatan Daerah

*Kabupaten Pesisir Barat.* (n.d.). Diambil 16 November 2022, dari <https://bapenda.pesisirbaratkab.go.id/informasi/id/3/sumber-sumber-penerimaan-daerah.html>

Suryawati, C. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional.*

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2021). *TNP2K | Acceleration Policies.* <https://tnp2k.go.id/acceleration-policies/pengurangan-kemiskinan-ekstrem-di-7-provinsi-dan-35-kabupaten-prioritas-tahun-2021>

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (edisi sebe). Erlangga.

Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2005. (2005). *Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 1*, 1–5.

UU Nomor 33 Tahun 2004. (2004). *101*(3), 55.  
<http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Data Penelitian

<b>KABUPATEN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KMS</b>	<b>PAD</b>	<b>DAU</b>	<b>DAK</b>	<b>IPM</b>	<b>PDRB_Prkpt</b>
Kab. Banjarnegara	2010	19,17	63374,521	592778,407	68885,563	60,7	10,84
Kab. Banjarnegara	2011	20,38	71107,053	562287,687	65367,1	61,58	11,35
Kab. Banjarnegara	2012	18,87	94271,468	681395,924	67730,85	62,29	11,85
Kab. Banjarnegara	2013	18,71	98975,32	763426,567	69482,63	62,84	12,41
Kab. Banjarnegara	2014	17,77	161652,538	826044,419	61066,04	63,15	12,98
Kab. Banjarnegara	2015	18,37	180561,0685	862810,552	133441,5	64,73	13,6
Kab. Banjarnegara	2016	17,46	221048,3875	976642,965	252046,6837	65,52	14,25
Kab. Banjarnegara	2017	17,21	297485,382	959486,489	423935,2623	65,86	18,3
Kab. Banjarnegara	2018	15,46	235994,4361	959486,489	364545,2349	66,54	15,72
Kab. Banjarnegara	2019	14,76	257700,65	999003,344	323297,06	67,34	16,6
Kab. Banjarnegara	2020	15,64	263413,965	959486489	351732,368	67,45	14,83
Kab. Banyumas	2010	20,02	164892,425	720191,172	76326,3	66,87	14,78
Kab. Banyumas	2011	21,11	193263,34	83609,874	93892,4	67,45	15,59
Kab. Banyumas	2012	19,44	242106,509	991945,01	118901,78	68,06	16,34
Kab. Banyumas	2013	18,44	308349,434	1127939,938	78662,73	68,55	17,31
Kab. Banyumas	2014	17,45	435597,689	1224710,992	82519,14	69,25	18,12
Kab. Banyumas	2015	17,52	502281,3495	1277833,796	87526,8	69,89	19,05
Kab. Banyumas	2016	17,23	541418,3869	1398539,653	412853,8096	70,49	20,02
Kab. Banyumas	2017	17,05	619701,6274	1373971,809	449360,4797	70,75	21,11
Kab. Banyumas	2018	13,50	648326,914	1373971,809	477533,0513	71,3	22,28
Kab. Banyumas	2019	12,53	686805,512	1437036,239	474659,909	71,96	23,61
Kab. Banyumas	2020	13,26	729892,819	1373971,809	543730,018	71,98	22,07
Kab. Batang	2010	14,67	45421,69	414493,766	46457,4	61,64	13,34
Kab. Batang	2011	13,47	60155,029	569223,666	57219	62,59	14,01
Kab. Batang	2012	12,40	84720,05	577238,039	54673,9	63,09	14,51
Kab. Batang	2013	11,96	139634,472	641663,63	49792,44	63,6	15,22

Kab. Batang	2014	11,13	172638,217	682182,894	52176,6	64,07	15,88
Kab. Batang	2015	11,27	179721,274	706782,246	79498,4	65,46	16,59
Kab. Batang	2016	11,04	209957,5594	790848,003	203972,5461	66,38	17,27
Kab. Batang	2017	10,80	219807,1283	779010,049	180074,0013	67,35	18,08
Kab. Batang	2018	8,69	237547,973	781383,387	231124,5094	67,86	18,95
Kab. Batang	2019	8,35	245836,087	817365,659	241894,552	68,42	19,91
Kab. Batang	2020	9,13	246398,163	781383387	266214,951	68,65	18,79
Kab. Blora	2010	16,27	49932,245	485078,129	35494,793	63,02	12,21
Kab. Blora	2011	16,24	67021,77	668995,422	77094,4	63,88	12,68
Kab. Blora	2012	15,10	81987,007	673180,53	53989,76	64,7	13,23
Kab. Blora	2013	14,64	95186,717	753830,036	53492,89	65,37	13,87
Kab. Blora	2014	13,66	144724,17	823874,089	61140,66	65,84	14,41
Kab. Blora	2015	13,52	156402,924	848823,612	98119,41	66,22	15,12
Kab. Blora	2016	13,33	171277,5227	943325,498	277435,119	66,61	18,6
Kab. Blora	2017	13,04	280042,0191	926754,302	308447,9483	67,52	19,64
Kab. Blora	2018	11,90	203182,7951	926682,649	333004,0464	67,95	20,42
Kab. Blora	2019	11,32	264338,953	966573,992	355308,38	68,65	21,28
Kab. Blora	2020	11,96	236965,596	926682649	275708,795	68,84	19,78
Kab. Boyolali	2010	13,72	86493,385	587574,192	55663,7	68,76	14,72
Kab. Boyolali	2011	14,97	96489,134	641483,262	67160,7	69,14	15,54
Kab. Boyolali	2012	13,88	127725,207	780301,856	60360,69	69,51	16,26
Kab. Boyolali	2013	13,27	160752,45	871685,981	59233,5	69,81	17,09
Kab. Boyolali	2014	12,36	227516,496	943220,456	81095,72	70,34	17,9
Kab. Boyolali	2015	12,45	260633,6379	968089,632	88962,94	71,74	18,86
Kab. Boyolali	2016	12,09	292310,0322	1032744,01	279575,0549	72,18	19,75
Kab. Boyolali	2017	11,96	388014,8974	1014602,019	294632,4099	72,64	20,78
Kab. Boyolali	2018	10,04	342957,2137	1014602,019	381026,3057	73,22	21,85
Kab. Boyolali	2019	9,53	395431,863	1045669,923	353373,735	73,8	23,14
Kab. Boyolali	2020	10,18	369369,271	1014602019	390893,754	74,25	21,13
Kab. Brebes	2010	23,01	71025,304	738270,368	66824,2	59,49	11,61



Kab. Brebes	2011	22,72	78275,852	800182,837	65737,183	60,51	12,31
Kab. Brebes	2012	21,12	101806,858	981051,188	84451,16	60,92	12,8
Kab. Brebes	2013	20,82	135055,402	1098999,51	82628,9	61,87	13,49
Kab. Brebes	2014	20,00	267772,513	1186969,845	97975,31	62,55	14,14
Kab. Brebes	2015	19,79	301953,7098	1234338,079	118191,06	63,18	14,92
Kab. Brebes	2016	19,47	339156,0632	1339381,605	361801,358	63,98	15,61
Kab. Brebes	2017	19,14	523660,7737	1317061,804	400887,7436	64,86	16,43
Kab. Brebes	2018	17,17	346907,9725	1321798,057	398599,7591	65,68	17,23
Kab. Brebes	2019	16,22	379091,299	1373396,371	473606,165	66,12	18,25
Kab. Brebes	2020	17,03	398649,681	1321798057	470962,097	66,11	16,56
Kab. Cilacap	2010	18,11	149709,124	793266,735	100844,4	64,18	45,65
Kab. Cilacap	2011	17,15	173141,334	876994,368	102075,7	64,73	47,21
Kab. Cilacap	2012	15,92	196673,442	1057808,013	87652,46	65,72	47,83
Kab. Cilacap	2013	15,24	278507,546	1197315,06	108157,35	66,8	48,34
Kab. Cilacap	2014	14,21	374023,664	1291121,704	110203,96	67,25	49,47
Kab. Cilacap	2015	14,39	409845,6609	1332536,848	173385,7	67,77	52,14
Kab. Cilacap	2016	14,12	428598,3499	1384695,514	483813,4461	68,6	54,51
Kab. Cilacap	2017	13,94	648091,3811	1360370,867	440533,135	68,9	55,65
Kab. Cilacap	2018	11,25	527577,7403	1362443,518	443618,8535	69,56	57,05
Kab. Cilacap	2019	10,73	574276,794	1423200,397	443795,857	69,98	58,37
Kab. Cilacap	2020	11,46	495407,77	1362443518	388796,477	69,95	46,43
Kab. Demak	2010	18,76	56756,047	493497,366	56535,2	66,02	11,01
Kab. Demak	2011	18,21	74559,136	544460,415	67852,3	66,84	11,47
Kab. Demak	2012	16,73	105363,37	658971,337	81553,31	67,55	11,85
Kab. Demak	2013	15,72	138214,446	737911,647	76556,19	68,38	12,33
Kab. Demak	2014	14,60	220329,949	795874,748	74599,67	68,95	12,73
Kab. Demak	2015	14,44	254324,4875	833041,455	100060,6	69,75	13,34
Kab. Demak	2016	14,10	287457,5006	908643,744	306941,2126	70,1	13,88
Kab. Demak	2017	13,41	309612,4072	892681,795	293012,3508	70,41	14,54
Kab. Demak	2018	12,54	342324,8702	894376,873	275348,4034	71,26	15,18

Kab. Demak	2019	11,86	407400,541	946467,336	295358,455	71,87	15,91
Kab. Demak	2020	12,54	404373,956	894376873	311983,783	72,22	15,3
Kab. Grobogan	2010	17,86	78366,421	617827,183	67472,4	64,56	9,74
Kab. Grobogan	2011	17,38	87912,458	618442,63	78239,1	65,41	9,98
Kab. Grobogan	2012	16,13	105463,321	812990,74	97055,02	66,39	10,42
Kab. Grobogan	2013	14,87	143598,616	906666,365	104304,44	67,43	10,83
Kab. Grobogan	2014	13,86	235295,347	977675,512	85838,69	67,77	11,21
Kab. Grobogan	2015	13,68	272718,4392	1008901,5	131245,95	68,05	11,81
Kab. Grobogan	2016	13,57	299211,3162	1110337,027	322988,0082	68,52	12,28
Kab. Grobogan	2017	13,27	440456,2387	1091590,533	383277,1499	68,87	12,94
Kab. Grobogan	2018	12,31	315743,5317	1094460,434	385401,3617	69,32	13,63
Kab. Grobogan	2019	11,77	344559,032	1144560,87	384806,56	69,86	14,36
Kab. Grobogan	2020	12,46	332001,228	1094460434	404948,897	69,87	13,36
Kab. Jepara	2010	10,18	84713,358	529580,873	64454,4	66,76	12,14
Kab. Jepara	2011	10,32	103642,014	488819,992	70691,6	67,63	12,53
Kab. Jepara	2012	9,38	129076,57	712740,462	76460,53	68,45	13,05
Kab. Jepara	2013	9,23	133778,055	814380,324	67487,37	69,11	13,55
Kab. Jepara	2014	8,55	231673,06	887768,694	88987,813	69,61	13,99
Kab. Jepara	2015	8,50	270251,5827	935771,12	136519,05	70,02	14,48
Kab. Jepara	2016	8,35	322509,7533	1000373,359	339310,2147	70,25	14,99
Kab. Jepara	2017	8,12	325530,3465	982800,016	297902,5716	70,79	15,58
Kab. Jepara	2018	7,00	369330,4547	984914,9737	314882,4234	71,38	16,26
Kab. Jepara	2019	6,66	384979,093	1039864,085	319593,179	71,88	17,08
Kab. Jepara	2020	7,17	386441,887	984914973,7	275060,169	71,99	17,71
Kab. Karanganyar	2010	13,98	79510,217	520919,106	55095,1	70,31	20,12
Kab. Karanganyar	2011	15,29	104080,774	577562,945	58185,6	71	20,89
Kab. Karanganyar	2012	14,07	116706,893	720918,512	55514,41	72,26	21,9
Kab. Karanganyar	2013	13,58	161724,334	810216,582	55203,06	73,33	22,92
Kab. Karanganyar	2014	12,62	215298,86	870001,752	57238,71	73,89	23,89
Kab. Karanganyar	2015	12,46	255445,5498	906446,527	98090,62	74,26	24,86



Kab. Karanganyar	2016	12,49	301307,801	996164,049	352752,9151	74,9	25,97
Kab. Karanganyar	2017	12,28	415142,5634	978664,65	253371,9465	75,22	27,23
Kab. Karanganyar	2018	10,01	343156,4692	978664,65	308185,9197	75,54	28,61
Kab. Karanganyar	2019	9,55	387763,013	1018544,74	310662,896	75,89	30,14
Kab. Karanganyar	2020	10,28	357146,402	978664650	336120,79	75,86	28,07
Kab. Kebumen	2010	22,70	58742,305	642797,6	65818,9	63,08	10,6
Kab. Kebumen	2011	24,06	73339,838	731980,739	79150,7	64,05	11,2
Kab. Kebumen	2012	22,40	102344,166	906222,007	100103,33	64,47	11,7
Kab. Kebumen	2013	21,32	131481,737	1021871,18	79063,86	64,86	12,18
Kab. Kebumen	2014	20,50	242079,502	1125568,884	80709,17	65,67	12,84
Kab. Kebumen	2015	20,44	245159,2554	1146008,708	166313,24	66,87	13,6
Kab. Kebumen	2016	19,86	291016,3217	1256068,249	480415,5391	67,41	14,24
Kab. Kebumen	2017	19,60	443608,8625	1234003,169	438407,8352	68,29	14,93
Kab. Kebumen	2018	17,47	352047,0923	1234003,169	390504,7085	68,8	15,71
Kab. Kebumen	2019	16,82	409163,433	1279681,428	386546,619	69,6	16,62
Kab. Kebumen	2020	17,59	417693,691	1234003169	394979,83	69,81	14,5
Kab. Kendal	2010	14,47	86235,294	520676,886	58544,7	66,23	20,84
Kab. Kendal	2011	14,26	93289,527	569223,666	67344,7	66,96	22
Kab. Kendal	2012	13,17	120162,136	702708,128	63884,98	67,55	22,94
Kab. Kendal	2013	12,68	132870,703	788134,078	41931,49	67,98	24,15
Kab. Kendal	2014	11,80	215294,087	852170,849	47886,615	68,46	25,18
Kab. Kendal	2015	11,62	239564,404	884901,572	58360,304	69,57	26,28
Kab. Kendal	2016	11,37	265074,4065	972952,576	228131,891	70,11	27,52
Kab. Kendal	2017	11,10	404978,614	955860,928	249296,3328	70,62	28,89
Kab. Kendal	2018	9,84	335892,237	956331,0794	295942,7304	71,28	30,33
Kab. Kendal	2019	9,41	350500,85	998236,127	309059,354	71,97	31,99
Kab. Kendal	2020	9,99	425302,414	956331079,4	330733,395	72,29	29,96
Kab. Klaten	2010	17,47	54886,006	726234,465	70542,3	70,76	15,02
Kab. Klaten	2011	17,95	72293,79	793292,77	80954,1	71,16	15,88
Kab. Klaten	2012	16,71	84756,022	967284,829	74501,53	71,71	16,7

Kab. Klaten	2013	15,60	115454,162	1066318,427	61175,42	72,42	17,62
Kab. Klaten	2014	14,56	177923,444	1142586,588	66576,42	73,19	18,56
Kab. Klaten	2015	14,89	190622,6701	1164196,398	77379,17	73,81	19,47
Kab. Klaten	2016	14,46	224197,4085	1204344,586	318994,5891	73,97	20,4
Kab. Klaten	2017	14,15	371718,4393	1271590,068	302273,2022	74,25	21,41
Kab. Klaten	2018	12,96	395884,2441	1237967,327	373028,9915	74,79	22,5
Kab. Klaten	2019	12,28	311648,401	1282250,122	351593,529	75,29	23,78
Kab. Klaten	2020	12,89	304546,856	1237967327	371188,377	75,56	21,84
Kab. Kudus	2010	9,01	94385,097	463012,58	30502,2	69,22	67,94
Kab. Kudus	2011	9,45	102621,949	692178,702	38321,1	69,89	69,85
Kab. Kudus	2012	8,63	113622,25	637615,372	58346,76	70,57	71,76
Kab. Kudus	2013	8,62	144995,092	719406,935	52208,88	71,58	73,92
Kab. Kudus	2014	7,99	234073,38	795851,851	41391,675	72	76,24
Kab. Kudus	2015	7,73	255284,0925	784919,177	61238,184	72,72	78,23
Kab. Kudus	2016	7,65	279239,1067	822153,771	228303,2627	72,94	79,24
Kab. Kudus	2017	7,59	366031,2038	807711,173	257168,2724	73,84	80,83
Kab. Kudus	2018	6,98	337364,6094	807056,9908	239054,2671	74,58	82,48
Kab. Kudus	2019	6,68	343824,123	851036,584	237498,255	74,94	84,46
Kab. Kudus	2020	7,31	378701,78	807056990,8	18569,690	75	83,66
Kab. Magelang	2010	14,14	76057,773	604521,811	100912,4	63,28	12,13
Kab. Magelang	2011	15,18	90462,631	668922,157	78340,8	64,16	12,8
Kab. Magelang	2012	13,97	123722,781	816732,604	103595,18	64,75	13,29
Kab. Magelang	2013	13,96	173253,652	899528,369	43096,223	65,86	13,93
Kab. Magelang	2014	12,98	242448,677	965124,427	48736,118	66,35	14,54
Kab. Magelang	2015	13,07	261569,0918	996070,014	50907,384	67,13	15,15
Kab. Magelang	2016	12,67	288485,6781	1078981,977	83510,17041	67,85	15,82
Kab. Magelang	2017	12,42	403561,2383	1060027,733	56452,309	68,39	16,54
Kab. Magelang	2018	11,23	325089,0931	1060540,612	301160,6376	69,11	17,26
Kab. Magelang	2019	10,67	417178,1	1097366,974	327189,199	69,87	18,1
Kab. Magelang	2020	11,27	406095,299	1060540612	374065,573	69,87	17,61

Kab. Pati	2010	14,48	12526,538	620576,636	66729,6	65,13	15,74
Kab. Pati	2011	14,69	134475,562	468744,939	65371,6	65,71	16,55
Kab. Pati	2012	13,61	163733,666	850377,211	80449,02	66,13	17,42
Kab. Pati	2013	12,94	169127,416	960479,326	72903,37	66,47	18,33
Kab. Pati	2014	12,06	279254,884	1043498,355	79852,63	66,99	19,06
Kab. Pati	2015	11,95	310063,6408	1086645,667	92717,38	68,51	20,09
Kab. Pati	2016	11,65	314921,0848	1207508,997	327576,1492	69,03	21,07
Kab. Pati	2017	11,38	449821,3458	1186296,947	462940,7465	70,12	22,15
Kab. Pati	2018	9,90	384041,8469	1189796,87	414061,985	70,71	23,29
Kab. Pati	2019	9,46	363997,154	1240426,636	372139,522	71,35	24,64
Kab. Pati	2020	10,08	351859,894	1189796870	396378,522	71,77	23,09
Kab. Pekalongan	2010	16,29	67580,24	490039,078	63845,5	63,75	12,2
Kab. Pekalongan	2011	15,00	82105,27	472130,602	63702,6	64,72	12,79
Kab. Pekalongan	2012	13,85	114793,366	678713,899	77029,38	65,33	13,29
Kab. Pekalongan	2013	13,51	148550,938	768500,117	60587,59	66,26	13,98
Kab. Pekalongan	2014	12,57	255037,017	831579	60380,95	66,98	14,56
Kab. Pekalongan	2015	12,48	251558,9708	862011,706	89642,61	67,4	15,14
Kab. Pekalongan	2016	12,90	310572,5816	926571,243	222507,471	67,71	15,82
Kab. Pekalongan	2017	12,61	305394,2991	910294,366	342930,9338	68,4	16,56
Kab. Pekalongan	2018	10,06	311288,1437	915154,037	346840,7857	68,97	17,41
Kab. Pekalongan	2019	9,71	341344,415	974248,885	326171,879	69,71	18,31
Kab. Pekalongan	2020	10,19	90091,442	915154037	340114,098	69,63	16,61
Kab. Pemalang	2010	19,96	76441,045	619895,592	61660,2	58,64	8,93
Kab. Pemalang	2011	20,68	79677,543	553660,093	67464,4	59,66	9,33
Kab. Pemalang	2012	19,27	97951,208	827163,222	92869,03	60,78	9,79
Kab. Pemalang	2013	19,27	136362,282	931426,998	63504,568	61,81	10,29
Kab. Pemalang	2014	18,44	217345,44	1016813,333	54018,555	62,35	10,82
Kab. Pemalang	2015	18,30	230435,2129	1058982,53	110616,99	63,7	11,39
Kab. Pemalang	2016	17,58	275458,054	1197916,501	270426,6752	64,17	11,97
Kab. Pemalang	2017	17,37	425893,2669	1176872,96	343530,7264	65,04	12,6

Kab. Pemalang	2018	16,04	300481,8871	1180834,332	331768,1315	65,67	13,28
Kab. Pemalang	2019	15,41	350559,14	1223060,205	350820,964	66,32	14,09
Kab. Pemalang	2020	16,02	79300	1180834332	361546,02	66,32	12,37
Kab. Purbalingga	2010	24,58	79802,099	464788,521	44809	63,61	12,76
Kab. Purbalingga	2011	23,06	94937,162	521932,241	67533,3	64,33	13,33
Kab. Purbalingga	2012	21,19	112727,59	640265,475	75986,64	64,94	13,95
Kab. Purbalingga	2013	20,53	122858,739	719185,02	66641,06	65,53	14,52
Kab. Purbalingga	2014	19,75	202593,691	777989,499	57267,33	66,23	15,07
Kab. Purbalingga	2015	19,70	215622,0478	805222,229	72251,83	67,03	15,73
Kab. Purbalingga	2016	18,98	251816,6686	897337,823	242375,7098	67,48	16,33
Kab. Purbalingga	2017	18,80	355859,0036	881574,483	329597,9276	67,72	17,04
Kab. Purbalingga	2018	15,62	282679,0195	881574,483	333565,4969	68,41	17,79
Kab. Purbalingga	2019	15,03	305996,806	918228,685	332709,914	68,99	18,71
Kab. Purbalingga	2020	15,90	284009,239	881574483	314644,145	68,97	17,26
Kab. Purworejo	2010	16,61	69609,314	528061,281	56527,5	68,16	12,22
Kab. Purworejo	2011	17,51	88941,782	585851,015	60942,4	69,11	12,85
Kab. Purworejo	2012	16,32	98262,003	711741,839	69568,4	69,4	13,39
Kab. Purworejo	2013	15,44	125756,041	793904,679	53323,02	69,77	13,99
Kab. Purworejo	2014	14,41	200258,601	854737,495	57024,62	70,12	14,57
Kab. Purworejo	2015	14,27	233934,1343	875528,049	85821,19	70,37	15,29
Kab. Purworejo	2016	13,91	255599,2404	940778,244	339417,6145	70,66	16,03
Kab. Purworejo	2017	13,81	298606,4947	924251,795	250875,2953	71,31	16,83
Kab. Purworejo	2018	11,67	286971,59	924251,795	297357,4224	71,87	17,68
Kab. Purworejo	2019	11,45	280396,156	963312,191	309541,855	72,5	18,68
Kab. Purworejo	2020	11,78	307258,622	924251795	334917,366	72,68	17,09
Kab. Rembang	2010	23,40	65699,259	411434,996	48878,4	64,53	14,13
Kab. Rembang	2011	23,71	73931,946	547169,709	62327,2	65,36	14,73
Kab. Rembang	2012	21,88	102727,487	570454,948	78350,66	66,03	15,37
Kab. Rembang	2013	20,97	126808,084	640273,36	42098,91	66,84	16,06
Kab. Rembang	2014	19,50	179642,188	700774,721	46206	67,4	16,75

Kab. Rembang	2015	19,28	193122,7599	723091,447	98419,408	68,18	17,52
Kab. Rembang	2016	18,54	234168,3658	785380,985	107558,652	68,6	18,3
Kab. Rembang	2017	18,35	300319,2848	771584,367	110696,9017	68,95	19,43
Kab. Rembang	2018	15,41	296676,4363	771584,367	89575,32462	69,46	20,42
Kab. Rembang	2019	14,95	308445,489	799760,392	213425,406	70,15	21,43
Kab. Rembang	2020	15,60	307258,622	771584367	264133,374	70,02	20,8
Kab. Semarang	2010	10,50	98831,141	508915,019	51310,3	69,58	23,13
Kab. Semarang	2011	10,30	129771,004	567856,479	69002	70,35	24,21
Kab. Semarang	2012	9,40	156192,739	691271,583	67737,2	70,88	25,31
Kab. Semarang	2013	8,51	215684,519	778604,92	59113,47	71,29	26,44
Kab. Semarang	2014	8,05	248213,02	848736,01	67407,34	71,65	27,61
Kab. Semarang	2015	8,15	278851,9006	876672,925	40654,31	71,89	28,74
Kab. Semarang	2016	7,99	318536,0512	968848,031	310780,2215	72,4	29,87
Kab. Semarang	2017	7,78	417417,8488	951828,487	286621,8695	73,2	31,15
Kab. Semarang	2018	7,29	383475,6781	952362,147	314696,8383	73,61	32,5
Kab. Semarang	2019	7,04	429011,081	1001565,375	317284,973	74,14	33,97
Kab. Semarang	2020	7,51	479870,281	952362147	345470,193	74,1	33
Kab. Sragen	2010	17,49	79627,348	561675,09	122449,978	67,67	18,41
Kab. Sragen	2011	17,95	94518,999	618442,63	71611,8	68,12	19,53
Kab. Sragen	2012	16,72	127695,844	778668,035	69378,28	68,91	20,62
Kab. Sragen	2013	15,93	146721,55	869155,545	61857,56	69,95	21,91
Kab. Sragen	2014	14,87	254392,45	946826,641	76469,3	70,52	23,04
Kab. Sragen	2015	14,86	267711,8205	977443,589	149737,34	71,1	24,33
Kab. Sragen	2016	14,38	297176,3326	1067774,278	333935,9807	71,43	25,65
Kab. Sragen	2017	14,02	404569,4047	1049016,918	317898,0365	72,4	27,09
Kab. Sragen	2018	13,12	334303,2843	1049016,918	320063,1007	72,96	28,56
Kab. Sragen	2019	12,79	368325,8	1083308,681	385117,566	73,43	30,3
Kab. Sragen	2020	13,38	338220,314	1049016918	364392,237	73,95	29,37
Kab. Sukoharjo	2010	10,94	64446,168	516588,118	49452,9	71,53	19,81
Kab. Sukoharjo	2011	11,13	96166,807	564840,146	49163,8	72,34	20,77

Kab. Sukoharjo	2012	10,15	164954,319	680235,009	47616,31	72,81	21,79
Kab. Sukoharjo	2013	9,87	192971,72	763462,9	53124,68	73,22	22,84
Kab. Sukoharjo	2014	9,18	264814,414	826891,481	56904,48	73,76	23,87
Kab. Sukoharjo	2015	9,26	313947,492	854457,636	68771,69	74,53	25,01
Kab. Sukoharjo	2016	9,07	363163,4282	959910,2114	287044,5585	75,06	26,22
Kab. Sukoharjo	2017	8,75	464567,4099	906416,629	278332,9474	75,56	27,51
Kab. Sukoharjo	2018	7,41	433485,4812	906416,629	286887,2719	76,07	28,88
Kab. Sukoharjo	2019	7,14	458742,224	946104,486	278544,6	76,84	30,51
Kab. Sukoharjo	2020	7,68	332207,075	906416629	301252,234	76,98	15,37
Kab. Tegal	2010	13,11	73062,775	640042,246	62484,1	61,14	10,81
Kab. Tegal	2011	11,54	90133,274	703779,493	61332,9	61,97	11,45
Kab. Tegal	2012	10,75	118741,62	860568,434	74555,35	62,67	12
Kab. Tegal	2013	10,58	156244,86	925576,304	72524,91	63,5	12,76
Kab. Tegal	2014	9,87	253716,603	1044211,31	63646,823	64,1	13,35
Kab. Tegal	2015	10,09	304000,9701	1085545,293	68489,256	65,04	14,04
Kab. Tegal	2016	10,10	316051,1897	1162102,111	290589,281	65,84	14,82
Kab. Tegal	2017	9,90	375531,1654	1141687,714	325623,7131	66,44	15,57
Kab. Tegal	2018	7,94	372282,6761	1144494,182	339287,873	67,33	16,39
Kab. Tegal	2019	7,64	436003,393	1198561,641	365945,635	68,24	17,34
Kab. Tegal	2020	8,14	416867,97	1144494182	403544,936	68,39	18,88
Kab. Temanggung	2010	13,46	55211,018	438090,923	46794,1	63,08	13,68
Kab. Temanggung	2011	13,38	63328,489	482937,812	57034,3	64,14	14,36
Kab. Temanggung	2012	12,32	76637,673	584158,278	87303,72	64,91	14,82
Kab. Temanggung	2013	12,42	102080,197	651171,674	41627,62	65,52	15,44
Kab. Temanggung	2014	11,55	160726,945	708764,753	56702,81	65,97	16,06
Kab. Temanggung	2015	11,76	212498,1399	731733,741	72728,59	67,07	16,75
Kab. Temanggung	2016	11,60	281328,149	807995,01	199009,5723	67,6	17,43
Kab. Temanggung	2017	11,46	308466,7483	793801,136	227597,7401	68,34	18,15
Kab. Temanggung	2018	9,87	252019,9348	793485,677	225548,8114	68,83	18,92
Kab. Temanggung	2019	9,42	278313,775	828948,502	259084,004	69,56	19,8



Kab. Temanggung	2020	9,96	266913,818	793485677	279373,355	69,57	18,88
Kab. Wonogiri	2010	15,67	64968,769	616996,009	72347,9	63,9	14,3
Kab. Wonogiri	2011	15,74	77141,691	682033,161	77831,7	64,75	14,75
Kab. Wonogiri	2012	14,67	100037,192	828479,528	75052,1	65,75	15,56
Kab. Wonogiri	2013	14,02	111592,606	917476,557	75705,89	66,4	16,24
Kab. Wonogiri	2014	13,09	182149,063	1001378,439	59392,12	66,77	17,03
Kab. Wonogiri	2015	12,98	211208,6012	1031393,472	86117,52	67,76	17,89
Kab. Wonogiri	2016	13,12	218604,8546	1145434,277	289121,068	68,23	18,77
Kab. Wonogiri	2017	12,90	333840,4349	1125312,68	360636,3851	68,66	19,71
Kab. Wonogiri	2018	10,75	269032,4276	1124733,467	379596,2119	69,37	20,73
Kab. Wonogiri	2019	10,25	287221,63	1181037,066	391309,608	69,98	21,85
Kab. Wonogiri	2020	10,86	252340,642	1124733467	393267,688	70,25	19,75
Kab. Wonosobo	2010	23,15	52079,017	442370,077	442370,077	62,5	11,91
Kab. Wonosobo	2011	24,21	67397,977	485766,439	62280,6	63,07	12,47
Kab. Wonosobo	2012	22,50	82335,296	597858,484	55970,27	64,18	12,99
Kab. Wonosobo	2013	22,08	108729,509	665548,034	57950,18	64,57	13,43
Kab. Wonosobo	2014	21,42	175319,365	724245,009	59423,01	65,2	14
Kab. Wonosobo	2015	21,45	182607,6288	748447,761	56541,744	65,7	14,58
Kab. Wonosobo	2016	20,53	199894,7675	841407,175	198974,002	66,19	15,29
Kab. Wonosobo	2017	20,32	228017,4739	826626,357	267466,63	66,89	15,86
Kab. Wonosobo	2018	17,58	226819,4786	827791,657	277386,9758	67,81	16,59
Kab. Wonosobo	2019	16,63	238371,743	877474,203	329638,507	68,27	17,53
Kab. Wonosobo	2020	17,36	224697,827	827791657	332341,859	68,22	15,47
Kota Magelang	2010	10,51	59548,102	260.122,80	15046,993	73,99	33,87
Kota Magelang	2011	11,06	63557,702	292.580,30	24342,1	74,47	35,76
Kota Magelang	2012	10,31	90986,302	348.498,19	20667,81	75	37,55
Kota Magelang	2013	9,8	107739,839	385.859,24	20644,487	75,29	39,67
Kota Magelang	2014	9,14	164927,631	417.211,45	22365,783	75,79	41,45
Kota Magelang	2015	9,05	186677,4101	418257,922	25774,76	76,39	43,44
Kota Magelang	2016	8,79	220315,8487	447909,575	89394,07346	77,16	45,59

Kota Magelang	2017	8,75	233557,7144	440041,244	86387,99432	77,84	47,92
Kota Magelang	2018	7,87	249877,4243	440041,244	105991,3028	78,31	50,37
Kota Magelang	2019	7,46	273582,933	455177,029	99763,232	78,8	53,23
Kota Magelang	2020	7,58	255038,22	460404,05	79271,912	78,99	51,94
Kota Pekalongan	2010	9,36	32710,581	266792,669	20789,277	68,95	16,4
Kota Pekalongan	2011	10,04	63344,978	293530,03	24674,7	69,54	17,12
Kota Pekalongan	2012	9,47	91205,786	347390,356	27126,72	69,95	17,89
Kota Pekalongan	2013	8,26	114252,439	384489,368	34721,1	70,82	18,76
Kota Pekalongan	2014	8,02	144075,424	412871,094	34173,71	71,53	19,59
Kota Pekalongan	2015	10,89	152044,5963	421276,527	45408,12	72,69	20,39
Kota Pekalongan	2016	10,88	178604,4609	457085,256	109412,6692	73,32	21,28
Kota Pekalongan	2017	10,65	192002,8712	449055,738	108994,0597	73,77	22,22
Kota Pekalongan	2018	9,08	179224,4087	449055,738	110631,0254	74,24	23,28
Kota Pekalongan	2019	8,7	212777,435	475842,089	115463,502	74,77	24,48
Kota Pekalongan	2020	9,03	218020,32	480230,431	126976,389	74,98	23,92
Kota Salatiga	2010	8,28	51549,747	238069,009	21182,3	78,35	34,25
Kota Salatiga	2011	7,8	60611,34	262653,05	23540,6	78,76	35,93
Kota Salatiga	2012	7,11	63171,463	325710,016	27639,76	79,1	37,36
Kota Salatiga	2013	6,4	106100,45	358331,867	16958,76	79,37	39,11
Kota Salatiga	2014	5,93	165747,645	399083,343	24042,788	79,98	40,69
Kota Salatiga	2015	5,8	167010,5552	400176,755	33981,288	80,96	42,21
Kota Salatiga	2016	5,24	203768,652	456079,561	83698,1932	81,14	43,82
Kota Salatiga	2017	5,07	220243,3611	448067,71	119572,1876	81,68	45,65
Kota Salatiga	2018	4,84	208926,057	448067,71	88527,21975	82,41	47,65
Kota Salatiga	2019	4,76	236086,898	469967,335	80522,09	83,12	50,03
Kota Salatiga	2020	4,94	228004,915	475828,296	87149,688	83,14	49,51
Kota Semarang	2010	5,12	327992,259	640186,272	30292,2	76,96	51,81
Kota Semarang	2011	5,68	522925,031	715700,805	48401,5	77,58	54,23
Kota Semarang	2012	5,13	786563,412	936865,926	72270,9	78,04	56,47
Kota Semarang	2013	5,25	925919,311	1054002,569	14993,022	78,68	58,98



Kota Semarang	2014	5,04	1138364,451	1104739,473	29236,965	79,24	61,63
Kota Semarang	2015	4,97	1201581,778	1126847,634	46661,15	80,23	64,14
Kota Semarang	2016	4,85	1491645,9	1211708,204	246886,747	81,19	66,82
Kota Semarang	2017	4,62	1791886,379	1190422,387	57527,14528	82,01	70,14
Kota Semarang	2018	4,14	1821274,103	1190422,387	79584,0942	82,72	73,49
Kota Semarang	2019	3,98	2066333,417	1317186,595	307161,094	83,19	77,62
Kota Semarang	2020	4,34	2516646,593	1299131,994	374826,015	83,05	83,26
Kota Surakarta	2010	13,96	211149,622	499448,133	29118,40	77,45	42,92
Kota Surakarta	2011	12,9	181096,816	473888,738	34895,10	78	45,44
Kota Surakarta	2012	12	231672,1	595222,827	28972,18	78,44	47,73
Kota Surakarta	2013	11,74	298400,847	659647,382	32893,04	78,89	50,48
Kota Surakarta	2014	10,95	335660,207	710803,934	43848,11	79,34	52,9
Kota Surakarta	2015	8,09	372798,4268	713300,856	3750,10	80,14	55,55
Kota Surakarta	2016	7,92	425502,7791	841536,122	196726,445	80,76	58,3
Kota Surakarta	2017	7,47	527544,225	826753,038	170806,132	80,85	61,39
Kota Surakarta	2018	6,75	527739,3882	826587,795	216821,1736	81,46	64,7
Kota Surakarta	2019	6,6	546020,008	879123,635	198845,553	81,86	68,55
Kota Surakarta	2020	7,17	303178,239	799696,465	175453,855	82,21	66,65
Kota Tegal	2010	10,62	101321,867	244580,618	24689,7	69,33	28,73
Kota Tegal	2011	10,81	117244,291	265483,086	23568,5	70,03	30,42
Kota Tegal	2012	10,04	156663,028	334819,065	30554,77	70,68	31,52
Kota Tegal	2013	8,84	176377,335	370642,983	30039,185	71,44	33,15
Kota Tegal	2014	8,54	241936,168	390732,536	22933,763	72,2	34,66
Kota Tegal	2015	8,26	271601,4074	405831,088	74377,832	72,96	36,38
Kota Tegal	2016	8,2	287343,89	490772,001	165828,1347	73,55	38,21
Kota Tegal	2017	8,11	306830,6561	482150,715	133603,2341	73,95	40,34
Kota Tegal	2018	7,81	275021,4486	482150,715	94845,07052	74,44	42,55
Kota Tegal	2019	7,47	285575,789	502969,026	119802,446	74,93	45,07
Kota Tegal	2020	7,8	333012,742	512935,79	153175,243	75,07	40,08

## Lampiran 2 Hasil Regresi

### UJI CEM

Dependent Variable: KMS  
Method: Panel Least Squares  
Date: 10/27/22 Time: 15:37  
Sample: 2010 2020  
Periods included: 11  
Cross-sections included: 35  
Total panel (balanced) observations: 385

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	52.03594	2.912416	17.86693	0.0000
PAD	-6.10E-08	8.28E-07	-0.073586	0.9414
DAU	-5.30E-10	6.36E-10	-0.833556	0.4051
DAK	-3.75E-07	1.39E-06	-0.269970	0.7873
IPM	-0.539241	0.044962	-11.99315	0.0000
PDRB_PRKPT	-0.050039	0.014053	-3.560763	0.0004

R-squared	0.537562	Mean dependent var	12.99439
Adjusted R-squared	0.531461	S.D. dependent var	4.485856
S.E. of regression	3.070564	Akaike info criterion	5.097061
Sum squared resid	3573.350	Schwarz criterion	5.158670
Log likelihood	-975.1843	Hannan-Quinn criter.	5.121496
F-statistic	88.11385	Durbin-Watson stat	0.070167
Prob(F-statistic)	0.000000		

### UJI FEM

Dependent Variable: KMS  
Method: Panel Least Squares  
Date: 10/27/22 Time: 15:38  
Sample: 2010 2020  
Periods included: 11  
Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 385

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.22149	3.400425	19.76856	0.0000
PAD	1.66E-06	5.26E-07	3.153656	0.0018
DAU	2.24E-10	1.99E-10	1.124915	0.2614
DAK	-2.29E-06	6.28E-07	-3.642612	0.0003
IPM	-0.767631	0.053764	-14.27770	0.0000
PDRB_PRKPT	-0.026625	0.024736	-1.076398	0.2825

---

#### Effects Specification

---

Cross-section fixed (dummy variables)

---

R-squared	0.963828	Mean dependent var	12.99439
Adjusted R-squared	0.959739	S.D. dependent var	4.485856
S.E. of regression	0.900099	Akaike info criterion	2.725469
Sum squared resid	279.5114	Schwarz criterion	3.136196
Log likelihood	-484.6528	Hannan-Quinn criter.	2.888365
F-statistic	235.7091	Durbin-Watson stat	0.804080
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

#### UJI REM

Dependent Variable: KMS

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 10/27/22 Time: 15:40

Sample: 2010 2020

Periods included: 11

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 385

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.48063	3.223715	20.31216	0.0000
PAD	1.55E-06	4.97E-07	3.111306	0.0020
DAU	1.90E-10	1.98E-10	0.961818	0.3368
DAK	-2.46E-06	6.07E-07	-4.045489	0.0001
IPM	-0.741108	0.050308	-14.73153	0.0000
PDRB_PRKPT	-0.028721	0.021185	-1.355707	0.1760

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		2.914404	0.9129
Idiosyncratic random		0.900099	0.0871

Weighted Statistics			
R-squared	0.766405	Mean dependent var	1.204828
Adjusted R-squared	0.763323	S.D. dependent var	1.858909
S.E. of regression	0.904349	Sum squared resid	309.9640
F-statistic	248.6930	Durbin-Watson stat	0.731369
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.508777	Mean dependent var	12.99439
Sum squared resid	3795.774	Durbin-Watson stat	0.059724

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	119.575696 (34,345)		0.0000
Cross-section Chi-square	981.063016	34	0.0000

**UJI HAUSMAN**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.587507		50.1267